

**BUKU
AJAR**



EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL

SUATU PENGANTAR

PENULIS

**ANDIKA DRAJAT MURDANI, S.IP., M.A.
HASNA WIJAYATI, S.IP., M.A.**

Ekonomi Politik Internasional: Suatu Pengantar

Penulis:

Andika Drajat Murdani, S.IP., M.A.

Hasna Wijayati, S.IP., M.A.

Penerbit



Unisri Press © 2023

Ekonomi Politik Internasional: Suatu Pengantar

Penulis:

Andika Drajat Murdani, S.IP., M.A.

Hasna Wijayati, S.IP., M.A.

ISBN: 978-623-5859-53-8

Editor:

Halifa Haqqi

Tata letak:

Nuniek Prasetyowati

Desain sampul:

Roni Setyawan

Penerbit: UNISRI Press

Jalan Sumpah Pemuda No 18. Joglo, Banjarsari, Surakarta

unisripress@gmail.com / press.unisri.ac.id / unisri.press

Anggota APPTI

Cetakan Pertama, 2022

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

**Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi
buku tanpa izin tertulis dari penulis/ penerbit.**

Prakata

Puji syukur yang setinggi-tingginya kiranya wajib disampaikan penulis kepada Allah SWT karena atas bimbingan-Nya, buku Ekonomi Politik Internasional: Suatu Pengantar, yang ditujukan sebagai buku ajar ini dapat terselesaikan. Buku ini dikonsep sebagai buku ajar mata kuliah Ekonomi Politik Internasional, yang dapat dijadikan sebagai rujukan oleh para mahasiswa di program studi yang berkaitan, terutama pada Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Prodi Ilmu Politik, juga Ilmu Pemerintahan.

Pemahaman tentang Ekonomi Politik Internasional adalah hal penting untuk dimiliki oleh para mahasiswa terutama pada prodi terkait, guna meningkatkan pemahaman mereka tentang dinamika, konsep dan teori yang berlangsung dalam dunia ekonomi dan politik. Sebab, ekonomi dan politik merupakan dua aspek yang sesungguhnya memiliki kaitan erat dan saling mempengaruhi. Studi ekonomi murni dan politik murni tidak secara komprehensif melihat keterkaitan antara dua aspek ini, padahal, keduanya adalah hal yang sering tak terpisahkan dalam implementasinya.

Hal ini membuat studi tentang ekonomi politik menjadi hal penting. Apalagi, bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, dinamika ekonomi politik ini didalami dengan melihat berbagai peristiwa di tingkat internasional, guna

mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai implementasinya di berbagai negara atau berbagai kondisi. Implementasi atau hubungan dari ekonomi dan politik memang dapat berlangsung fleksibel sehingga dibutuhkan banyak studi kasus guna menambah pemahaman.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dalam berbagai hal. Oleh karena itu, saran, kritik dan masukan yang sifatnya membangun senantiasa diterima secara terbuka. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi para pembaca, terutama para mahasiswa atau akademisi yang berkepentingan untuk mendalami materi ekonomi politik internasional.

Surakarta, Januari 2022
Penulis

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi	v
Bab 1 - Konsep Dasar Ekonomi Politik Internasional...	1
A. Indikator Pembelajaran	1
B. Materi Pembelajaran	2
C. Rangkuman	13
D. Pendalaman Materi	14
Bab 2 - Merkantilisme dan Liberalisme dalam Memandang Ekonomi Politik Internasional	15
A. Indikator Pembelajaran	15
B. Materi Pembelajaran	16
C. Rangkuman	35
D. Pendalaman Materi	36
Bab 3 - Marxisme dan Neo Klasik dalam Ekonomi Politik Internasional	37
A. Indikator Pembelajaran	37
B. Materi Pembelajaran	38
C. Rangkuman	52
D. Pendalaman Materi	54
Bab 4 - Teori Strukturalisme dan Dependensia dalam Ekonomi Politik Internasional	55
A. Indikator Pembelajaran	55

B. Materi Pembelajaran	56
C. Rangkuman	66
D. Pendalaman Materi	67
Bab 5 - <i>International Trade dan Multi-Nationals Company</i>	68
A. Indikator Pembelajaran	68
B. Materi Pembelajaran	69
C. Rangkuman	80
D. Pendalaman Materi	81
Bab 6 - <i>International Finance dan International Monetary System</i>	82
A. Indikator Pembelajaran	82
B. Materi Pembelajaran	83
C. Rangkuman	89
D. Pendalaman Materi	90
Bab 8 - <i>Dinamika Footloose Industry</i>	91
A. Indikator Pembelajaran	91
B. Materi Pembelajaran	92
C. Rangkuman	94
D. Pendalaman Materi	95
Daftar Pustaka	96
Profil Penulis	99

Bab 1

-

Konsep Dasar Ekonomi Politik Internasional

A. Indikator Pembelajaran

Mahasiswa mampu menjelaskan definisi Ekonomi Politik Internasional, dengan indikator:

1. Ketepatan menjelaskan ekonomi dan politik dalam hubungan internasional
2. Ketepatan menjelaskan ekonomi politik internasional dalam hubungan internasional

B. Materi Pembelajaran

1. Hakikat Ekonomi Politik Internasional

Hakikat Ekonomi Politik Internasional dilihat dari posisi disiplin ilmu hubungan internasional yang menempatkan Ekonomi Politik Internasional sebagai salah satu sub bagian penting. Sebagai disiplin ilmu yang membahas berbagai aspek hubungan antar bangsa-negara dan entitas internasional lain, hubungan internasional memiliki beberapa subbidang yang secara khusus menjelaskan masalah ekonomi di tingkat internasional. Subbidang ini dikenal sebagai Ekonomi Politik Internasional. Bidang ini berkaitan dengan interaksi, interaksi, keterkaitan, keterkaitan dan interaksi antara faktor politik dan ekonomi dalam konteks hubungan internasional.

Fokus analisis ekonomi politik internasional adalah pada keterkaitan antara faktor 'pasar' dan 'negara', antara pertukaran dan otoritas, dan antara kekayaan dan kekuasaan. Aspek-aspek ini mengemuka dalam lanskap politik internasional dan menerima banyak perhatian. Sebelum masuk dalam pembahasan lebih lanjut tentang ekonomi politik internasional, kita dapat lebih dulu memahami relasi konteks ekonomi politik.

Lantas apa itu ekonomi politik? Ekonomi politik adalah ilmu sosial yang mempelajari produksi, perdagangan, dan hubungannya dengan hukum dan pemerintahan. Ini adalah studi

tentang bagaimana teori ekonomi mempengaruhi berbagai sistem sosial ekonomi seperti sosialisme dan komunisme, serta desain dan implementasi kebijakan publik.

Kelompok ekonomi yang berbeda memiliki teori mereka sendiri tentang bagaimana ekonomi harus berkembang. Demikian pula dengan kelompok politik yang memiliki dasar pemikirannya sendiri. Ekonomi politik dengan demikian merupakan bidang yang kompleks yang mencakup berbagai kepentingan politik yang bersandingan dengan kepentingan ekonomi. Sederhananya, ekonomi politik mengacu pada saran yang diberikan para ekonom kepada pemerintah tentang kebijakan ekonomi umum atau proposal khusus oleh politisi, yang dapat berlaku sebaliknya karena kedua aspek ini pada dasarnya dapat saling mempengaruhi satu sama lain.

Studi dasar dalam Ekonomi Politik dapat dibagi menjadi dua bagian: Ekonomi Politik Klasik dan Ekonomi Politik Modern. Ekonomi Politik Klasik mengkaji karya para filsuf seperti Machiavelli, Adam Smith, dan Karl Marx. Ekonomi Politik Kontemporer, di sisi lain, meneliti karya filsuf kontemporer, ekonom, dan ilmuwan politik seperti John Maynard Keynes, Milton Friedman, dan Friedrich Hayek.

Penelitian ekonomi politik banyak dipengaruhi oleh teori permainan karena berbagai kelompok bersaing untuk mendapatkan sumber daya dan kekuasaan yang terbatas untuk menentukan kebijakan mana yang menghasilkan hasil yang paling

menguntungkan. Fokus kajian pada bidang ini juga melihat kemampuan ekonomi untuk menghasilkan hasil yang diinginkan.

Dari perspektif interdisipliner, Ekonomi Politik berfokus pada ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik untuk memahami bagaimana sistem ekonomi, institusi politik, dan lingkungan saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Tiga bidang studi interdisipliner meliputi model ekonomi proses politik, ekonomi politik internasional dan dampaknya terhadap hubungan internasional, dan alokasi sumber daya dalam berbagai sistem ekonomi.

Adapun secara spesifik, pembahasan ekonomi politik internasional, atau yang juga disebut ekonomi politik global, menganalisis hubungan antara ekonomi dan hubungan internasional. Kajian ini menggunakan ide-ide dari ekonomi, sosiologi dan ilmu politik. Ekonomi Politik Internasional berfokus pada bagaimana negara dan institusi menggunakan interaksi ekonomi global untuk membentuk sistem politik.

Lantas, apa pengertian dari ekonomi politik internasional? Secara singkat, seperti yang dikatakan oleh Walter S. Jones (1993: 223), konsep ekonomi politik internasional didefinisikan sebagai interaksi global antara politik dan ekonomi. Ia lebih jauh mengutip pandangan Robert Gilpin (Jones 1993: 223-224) yang mencatat eratnya hubungan antara politik dan ekonomi:

Pada satu pihak, politik begitu menentukan kerangka aktivitas ekonomi dan mengarahkannya untuk melayani kepentingan kelompok-kelompok dominan; penggunaan kekuasaan dalam berbagai bentuknya sangat menentukan hakikat suatu sistem ekonomi. Di lain pihak, proses

ekonomi itu sendiri cenderung meredistribusikan kekuasaan dan kekayaan; ekonomi merombak hubungan kekuasaan antarkelompok. Pada gilirannya hal itu merombak sistem politik, sekaligus membentuk struktur hubungan ekonomi yang baru. Jadi, dinamika hubungan internasional di zaman modern pada pokoknya merupakan fungsi interaksi timbal balik antara ekonomi dan politik.

Menurut Adam Smith, ekonomi politik adalah "disiplin negarawan atau legislator" dan pedoman untuk mengatur ekonomi. Menurut Mochtar Mas'od, ekonomi politik menitikberatkan kajian pada hubungan dan interaksi antara fenomena politik dan ekonomi, negara dan pasar, lingkungan domestik dan internasional, serta pemerintah dan masyarakat. Fokus pembahasan EPI adalah pada interaksi pasar dan aktor politiknya.

Menurut Thomas Oetley, ekonomi politik internasional adalah studi tentang bagaimana kepentingan ekonomi dan proses politik mempengaruhi kebijakan pemerintah. Ekonomi politik internasional mempelajari kehidupan dalam ekonomi global, yang berfokus pada perjuangan politik antara yang kuat dan yang lemah dalam pertukaran ekonomi global. "Ekonomi politik global" adalah interaksi pasar dan aktor kuat seperti negara, perusahaan multinasional, dan organisasi internasional. Ekonomi Politik Internasional mengkaji bagaimana pertarungan politik antara yang kuat dan yang lemah dalam pertukaran ekonomi global membentuk perkembangan ekonomi dunia.

2. Sejarah Perkembangan Studi EPI

Sejarah perkembangan studi EPI berkaitan erat dengan pemisahan pemikiran pada studi ekonomi dan politik. Ekonomi politik internasional menawarkan pemahaman tentang disiplin ilmu yang sangat kompleks. Gelar EPI tidak hanya berurusan dengan politik dan ekonomi, tetapi juga berbagai bidang seperti filsafat, sejarah, dan antropologi. EPI dipandang secara harfiah sebagai hubungan antara politik dan ekonomi dan oleh karena itu didasarkan pada gagasan para filsuf besar kuno.

Awalnya, politik dan ekonomi dianggap sebagai satu kesatuan dengan istilah ekonomi politik, belakangan istilah ini semakin banyak digunakan ke arah Ekonomi Politik Internasional (EPI) dan terus berkembang di bidang politik dan ekonomi, yaitu sosial. kehidupan dipisahkan.

Perbedaan itu disebabkan meningkatnya pemikiran individu dalam masyarakat yang didorong oleh revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi. Bidang studinya berkembang dan banyak isu praktis menentukan arah kebijakan ekonomi dunia.

Sejarah ekonomi politik internasional sebagai suatu disiplin ilmu sangat beragam dan beragam seperti bidangnya sendiri, namun secara umum sebagian besar literatur disusun dalam dua garis utama, yaitu pendekatan perspektif EPI, yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu merkantilisme, liberalisme, dan sosialisme ekonomi. Masing-masing kategori tersebut menjelaskan bahwa perumusan suatu kebijakan dipengaruhi oleh perspektif manusia. Pada saat yang sama, kemungkinan lain

adalah memisahkan mazhab Amerika dan Inggris dengan asumsi bahwa mereka tidak melihat pemisahan itu sebagai sesuatu yang mutlak, untuk menghindari perbedaan dan membesar-besarkan pemikiran kontemporer.

Gambaran umum ekonomi politik internasional dimulai dengan halaman sejarah di mana EPI lahir. Dimulai dengan penerapan pemikiran rasional/individualis Adam Smith pada EPI. Argumen yang kuat melawan penilaian William Jevons bahwa ekonomi dan politik harus dipertimbangkan secara terpisah.

Salah satu tokoh bernama Benjamin Cohen atau sering dipanggil Ben Cohen juga mengatakan bahwa ada tiga alasan untuk menceritakan kisah EPI sebagai variabel disiplin, yaitu:

- a. Minat praktis terkait topik EPI,
- b. Kemampuan EPI untuk menafsirkan peristiwa dunia dan
- c. Pengembangan EPI sebagai suatu disiplin ilmu belumlah selesai.

Sejarah konseptual ekonomi politik internasional dapat dipahami melalui munculnya konsep ekonomi politik. Istilah ekonomi politik diciptakan oleh Sir William Petty di Irlandia dalam sebuah karya yang ditulisnya sekitar tahun 1671. Petty adalah seorang pria luar biasa yang bangkit dari kemiskinan relatif dan menetap di Irlandia pada usia 41 tahun untuk menjadi Profesor Anatomi di Universitas Oxford.

Pretty sendiri mengabdikan dirinya untuk mengagumi dan mempelajari karya Francis Bacon dan penggunaan matematika sebagai dasar pemikiran rasionalis. Cukup berkembang apa yang disebut aritmatika politik, yang merupakan dasar statistik modern. Prinsip-prinsip aritmatika politik tidak berlaku lagi saat ini.

Adam Smith memimpin perubahan dalam Pencerahan. Di sana karyanya *The Wealth of Nations* memberontak melawan merkantilisme statistik. Peninggalan Adam Smith sangat berharga, baik dalam bidang ekonomi klasik maupun sebagai pendiri liberalisme ekonomi, bahwa manusia pada hakikatnya adalah rasionalis dan kalkulasi.

William Stanley Jevons adalah seorang ekonom yang bekerja di puncak akhir Revolusi Industri. Karya Jevons adalah *Teori Ekonomi Politik* pada tahun 1871. Ekonomi dan politik dianggap tidak dapat dipisahkan karena memperkenalkan kesenjangan struktural dalam persamaan intelektual yang memisahkan ekonomi dan politik sebagai bidang studi dan praktik yang terpisah. Selain itu, Jevons juga memperkenalkan konsep *Diminishing Marginal Utility* sebagai dasar teori pertukaran, yang kemudian menggerakkan revolusi marjinal yang melahirkan teori ekonomi neoklasik untuk menggantikan teori klasik Smith.

Dalam analisisnya, ekonomi politik yang mengarah pada teori ketergantungan dan konsep pembangunan yang tidak merata. Analisis ini merupakan gagasan sentral yang menekankan bisnis dan politik baik secara nasional maupun internasional. Ini

adalah bagaimana Anda mendapatkan informasi yang paling penting.

3. Pentingnya Pembelajaran EPI

Pentingnya pembelajaran EPI terletak pada posisi EPI pada disiplin ilmunya yang berkaitan erat dengan fenomena yang secara langsung sering berlangsung dalam dinamika hubungan internasional. Ekonomi politik internasional adalah disiplin akademik ilmu politik yang berhubungan dengan ekonomi dan hubungan internasional. sebagai penelitian interdisipliner. Tujuan utama mempelajari ekonomi politik internasional adalah untuk memahami sistem interaksi ekonomi dan pengaruh interaksi ekonomi terhadap struktur politik.

Dalam perekonomian dunia terdapat kontradiksi antara tumbuhnya saling ketergantungan ekonomi dunia dengan keinginan negara untuk mengatur ketergantungan ekonomi dan otonomi politiknya, karena pada saat yang sama negara ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari perdagangan bebas dengan pihak lain. . negara, tetapi di sisi lain, negara juga ingin melindungi otonomi politik, nilai-nilai budaya, dan struktur sosialnya.

Dapat dikatakan bahwa berfungsinya negara berjalan melalui logika sistem pasar, dimana pasar diperluas secara geografis dan kerjasama antar negara di berbagai wilayah diperluas melalui mekanisme harga, yaitu ekonomi politik

internasional. Contoh situasi ekonomi politik internasional adalah ketika Presiden AS George Bush mengembangkan kebijakan pemerintah pada tahun 2002 untuk meningkatkan biaya impor baja. Kebijakan itu didasarkan pada biaya impor baja yang mendapat posisi signifikan di pasar AS. Memecahkan berbagai masalah terkait penutupan pabrik dan PHK. Antara tahun 1997 dan 2002, 34 pabrik baja Amerika bangkrut dan sekitar 18.000 pekerja kehilangan pekerjaan. Pembuat baja percaya bahwa kebijakan menaikkan tarif baja akan melindungi mereka dari persaingan dari pembuat baja asing.

Tarif produksi baja Amerika lebih menguntungkan dari biasanya, jadi bagian dari modal investasi dan tenaga kerja di industri Amerika, perusahaan berkinerja tinggi seperti teknologi informasi dan bioteknologi adalah bagian dari Amerika Serikat. Digunakan pada baja berkekuatan rendah. Jadi, tarif menyebabkan Amerika Serikat menghabiskan terlalu banyak sumber daya untuk kegiatan ekonomi yang keadaannya tidak lebih baik dan terlalu sedikit sumber daya untuk kegiatan yang keadaannya tidak lebih baik. Akibatnya, Amerika Serikat lebih miskin dengan tarif baja yang tinggi daripada tanpa tarif. Tarif baja juga mendistribusikan pendapatan dari konsumen baja ke produsen baja, seperti perusahaan.

Amerika yang menggunakan baja dalam produknya dan konsumen Amerika yang membeli produk yang terbuat dari baja. Juga, karena tarif mempersulit perusahaan baja asing untuk

menjual di pasar AS, pendapatan produsen baja asing didistribusikan kembali ke produsen baja AS.

Contoh ini menunjukkan bahwa fokus utama EPI adalah bagaimana interaksi antara kepentingan bisnis, proses politik nasional dan internasional dapat membentuk atau mempengaruhi pembentukan kebijakan yang disetujui pemerintah. Studi kasus ini juga menunjukkan bahwa sistem politik Amerika memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi negara dan pekerja. Pada prinsipnya penelitian EPI tidak hanya menyorot negara atau pelaku ekonomi saja, ada juga badan organisasi untuk EPI. Serta Organisasi Perdagangan Dunia, yang berperan dalam mengatur kebijakan ekonomi yang disetujui oleh pemerintah.

4. Aliran Pemikiran Arus Utama

Studi dalam ilmu sosial seringkali memiliki kelemahan dalam kekuatan perspektifnya. Studi Ekonomi Politik Internasional yang masuk dalam ranah ilmu sosial pun juga memiliki karakter sulit ilmu sosial yakni sulitnya tercapai kesamaan pemahaman di antara para ahli dalam melihat pokok bahasan atau objek studi yang ada. Perbedaan sudut pandang yang terjadi antar ahli dalam melihat berbagai fenomena ini mengakibatkan terdapat banyak aliran-aliran pemikiran (*school of thought*), paradigma atau perspektif yang beragam dalam sub disiplin ilmu tersebut. Alhasil, adanya perbedaan aliran pemikiran

emnghasilkan metodologi penelitian, model analisis dan rekomendasi yang juga bervariasi.

Sebagai salah satu sub disiplin dalam ilmu hubungan internasional, perkembangan studi EPI juga diwarnai oleh beberapa aliran pemikiran atau perspektif. Masing-masing aliran ini memiliki irisan kesamaan, sekaligus terdapat perdebatan di antaranya. Bagi pelajar studi EPI era kini, tentu penting untuk memahami berbagai aliran pemikiran utama dalam studi EPI.

Yang menantang, pengkategorian aliran ini pun juga beragam. Robert Gilpin (1987) sendiri mengkategorikannya dalam tiga jenis aliran pemikiran utama, yakni perspektif liberal, nasionalis dan marxis. Adapun Frieden (2000) membaginya dalam liberalisme, realisme dan marxisme, sementara Balaam dan Veseth (2001) memperkenalkan pembagian berupa liberal, merkantilsme/ nasionalisme dan struktural. Masih ada Martin Staniland yang membagi aliran EPI menjadi realisme/ merkantilisme, interdependensi dan dependensi. Sementara tokoh EPI dalam negeri Indonesia, Mohtar Mas'ood, membaginya menjadi merkantilisme, radikal dan reformis.

Berbagai pengkategorian ini tentu memiliki dasar masing-masing, dengan mengacu pada berbagai literatur yang ada. Dalam buku ini, pengkategorian dilihat berdasarkan indikator karakteristik yang saling bertentangan satu sama lain. Pada akhirnya, perspektif arus utama ini pun juga selanjutnya diperdebatkan untuk dilihat dimana pertentangan antar pemikiran yang ada. Adapun detail pemikiran-pemikiran yang ada pada studi

EPI ini pada umumnya sudah dipelajari secara lebih mendalam pada teori hubungan internasional.

C. Rangkuman

Ekonomi politik internasional (EPI) didefinisikan sebagai studi tentang hubungan antara ekonomi dan politik di tingkat internasional. Di dalam studi EPI, banyak dipelajari masalah kompleks yang berkaitan antara ekonomi dan politik sekaligus, seperti masalah ekonomi seperti inflasi, defisit perdagangan atau neraca, investasi asing, efisiensi produksi, isu politik internasional dan politik dalam negeri. Pemikiran telah politik-ekonomi berkembang beberapa abad yang lalu dengan ragam perspektif yang kaya dari para pemikirnya.

Perkembangan studi pemikiran ini menghasilkan banyak aliran pemikiran EPI sehingga menghasilkan sudut pandang dan rekomendasi penyelesaian masalah yang berbeda pula. Kini realitas ekonomi politik semakin kuat, karena pada kenyataannya kehidupan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik. Sebaliknya, banyak keputusan politik didasarkan pada kepentingan finansial. Fenomena ini sangat terasa baik di negara industri maupun negara berkembang.

D. Pendalaman Materi

1. Kapan studi EPI mulai banyak dipelajari?
2. Mengapa studi EPI menjadi sub disiplin yang penting dipelajari dalam hubungan internasional?
3. Apa saja yang Anda ketahui tentang aliran pemikiran dalam studi EPI?

Bab 2

-

Merkantilisme dan Liberalisme dalam Memandang Ekonomi Politik Internasional

A. Indikator Pembelajaran

Mahasiswa mampu memerinci pemikiran Merkantilisme dan kritik Liberalisme dalam Ekonomi Politik Internasional, dengann indikator:

1. Ketepatan memerinci pemikiran, karakteristik, dan ciri teori Merkantilisme dalam Ekonomi Politik Internasional
2. Ketepatan memerinci pemikiran, karakteristik, dan ciri Liberalisme dalam Ekonomi Politik Internasional

B. Materi Pembelajaran

1. Perspektif Merkantilisme

Munculnya aliran merkantilisme sudah ada sejak Abad Pertengahan, abad ke-14 dan ke-18, atau masa kejayaan *laissez-faire*. Episode munculnya merkantilisme tidak berlalu dengan cepat, juga tidak terlihat jelas. Pada abad-abad itu, perkembangan ekonomi politik bahkan tidak terlihat. Masyarakat lebih menitikberatkan pada ciri-ciri kesejahteraan dalam sistem pasar yang tidak memihak. Saat itu, Eropa sedang mengalami transisi ekonomi yang lambat dari feodalisme ke ekonomi pasar yang berorientasi pada keuntungan. Ada banyak faktor yang berkontribusi terhadap munculnya merkantilisme ini. Eatwell (1987: 445), menjelaskan dijelaskan bahwa salah satunya adalah perkembangan pemikiran ekonomi Eropa yang dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi nasional.

Beberapa tanda yang memicu perkembangan ekonomi merkantilis ini adalah:

- a. Banyaknya penemuan dan penaklukan negara-negara Eropa ke wilayah geografis baru;
- b. modal baru mengalir masuk dan keluar dari wilayah geografis baru;
- c. munculnya raja dan pedagang yang mendorong nasionalisme;

- d. pengembangan bisnis lokal, mengarah ke bisnis baru di luar negeri, dengan tujuan memperoleh keuntungan lebih besar dari perdagangan luar negeri;
- e. lenyapnya kekuatan lama Gereja dan kaum bangsawan

Pengertian merkantilisme sendiri merupakan suatu pandangan dunia elit politik, yang berada di garis depan perkembangan negara modern. Merkantilisme melihat ekonomi internasional sebagai konflik antara kepentingan nasional yang bertentangan daripada bidang kerja sama dan saling menguntungkan. Persaingan ekonomi antar negara dapat mengambil dua bentuk yang berbeda (Gilpin 1987: 32).

Yang pertama adalah merkantilisme defensif atau bersahabat (*benign mercantilism*), dimana suatu negara melindungi kepentingan ekonomi nasionalnya karena merupakan bagian penting dari keamanan nasionalnya, kebijakan semacam itu tidak berdampak buruk bagi negara lain. Yang kedua adalah merkantilisme yang agresif atau buruk (*forced mercutatis*), di mana negara-negara mencari keuntungan dari ekonomi internasional melalui kebijakan ekspansif. Misalnya imperialisme kekuatan kolonial Eropa di Asia dan Afrika. Merkantilisme dengan demikian memandang kekuatan ekonomi dan militer-politik sebagai tujuan yang saling melengkapi, bukan bersaing, satu sama lain dalam lingkaran umpan balik yang positif. Memperoleh kekuatan ekonomi mendukung perkembangan

kekuatan politik dan militer negara, dan kekuatan politik dapat memajukan dan memperkuat ekonomi negara.

Merkantilis berpendapat bahwa ekonomi harus menjadi tujuan akhir untuk meningkatkan kekuasaan negara, politik harus didahulukan sebelum ekonomi. Namun, isi dari tindakan spesifik yang direkomendasikan untuk mencapai tujuan tersebut telah berubah seiring waktu. Singkatnya, merkantilisme memandang ekonomi sebagai subordinat dari komunitas politik, dan terutama kepada pemerintah. Kegiatan ekonomi dilihat dalam konteks yang lebih luas dengan bangkitnya kekuasaan negara. Sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan nasional, yang disebut negara, mengendalikan kepentingan ekonomi swasta. Kekayaan dan kekuasaan adalah tujuan yang saling melengkapi, bukan bertentangan. Ketergantungan finansial pada negara lain harus dihindari sejauh mungkin. Ketika manfaat ekonomi dan keamanan dibagi, manfaat keamanan diprioritaskan.

Ide pokok mazhab merkantilisme pada dasarnya muncul sebagai tanggapan atas pengejaran kekayaan. Atas dasar hal tersebut, beberapa pokok pikiran merkantilisme dapat diuraikan dalam beberapa bagian sebagai berikut:

- a. Karena emas dan perak adalah bentuk karakteristik kekayaan yang paling populer, ekspor logam mulia dilarang keras;

- b. Negara harus mampu mendorong kegiatan ekspor dan membangun kekayaan dengan mengorbankan negara lain (tetangga);
- c. Dengan kebijakan ekspor-impor, negara harus mencapai surplus yang maksimal;
- d. Kolonisasi dan monopolisasi perdagangan harus dilakukan secara eksklusif untuk keabadian koloni, yang tunduk dan bergantung pada ibu pertiwi;
- e. Bea cukai, pajak, dan pembatasan internal atas pergerakan barang diperjuangkan;
- f. memperkuat pemerintah pusat untuk memastikan bahwa kebijakan perdagangan dapat berjalan sebagaimana mestinya;
- g. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan sumber daya manusia yang tinggi penting untuk memenuhi kebutuhan militer dan juga untuk mengendalikan tentara bayaran yang kuat.

Dari sini kita dapat menarik kesimpulan sederhana bahwa dalam pandangan merkantilisme negara menjadi lebih kaya dengan mengekspor sebanyak mungkin dan mengimpor sesedikit mungkin. Namun, Hume menyatakan pemerintah di negara bagian ini tidak ikut campur dalam perdagangan internasional. Hal itu terjadi karena mereka meyakini adanya mekanisme aliran emas yang memungkinkan neraca perdagangan internasional kembali ke arah semula.

Agar negara mencapai neraca perdagangan yang aktif, ekspor harus didorong dan impor dibatasi. Alasan utamanya terkait dengan tujuan utama perdagangan luar negeri, yaitu untuk memperoleh tambahan logam mulia. Jadi kesimpulan sederhana dapat ditarik dari fakta bahwa perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri berorientasi pada tujuan politik merkantilisme untuk meningkatkan ekspor atas impor dan kelebihan ekspor dapat dibayar dengan logam mulia.

Para pedagang memiliki tujuan besar untuk memonopoli perdagangan. Berdasarkan tujuan tersebut, muncul kebijakan lain yang terkait, yaitu perampasan wilayah jajahan seluas mungkin untuk pemasaran hasil industri. Kondisi ini mendorong para pedagang untuk mencari wilayah geografis baru yang lebih luas untuk meningkatkan kekayaan. Padahal, topik utama diskusi di kalangan pedagang adalah bagaimana mencapai kekayaan sesuai standar mereka. Merkantilisme sering dianggap sebagai salah satu gagasan ekonomi atau politik ekonomi terbesar dalam sejarah, bersama dengan liberalisme dan sosialisme. Memahami sejarah merkantilisme, ciri-ciri dan gagasan pokok merkantilisme dari perspektif merkantilisme menjadi penting sebagai landasan pemikiran ekonomi dan politik.

2. Perspektif Liberalisme

Liberalisme akan selalu menjadi perdebatan menarik dalam konteks ekonomi politik, baik secara lokal maupun global. Liberalisme yang lahir pada zaman Renaisans mendapat tempat khusus dalam berbagai kajian pemikiran. Ide –ide dalam liberalisme pun terus menyubur dan mendapatkan banyak pendukung. Hingga saat ini, liberalisme juga masih dianggap sebagai paham yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi politik global.

Banyak studi ekonomi dan politik tentang liberalisme mengacu pada buku-buku karya Adam Smith (1723-1790). Salah satu bukunya yang paling banyak dikutip adalah buku (1776) *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations*, atau sering disebut *The Wealth of Nations*. Buku ini menjelaskan secara rinci hukum sebab akibat yang menjelaskan cara mencapai kekayaan. Juga menceritakan tentang pelaku ekonomi dan konsekuensi hukum ekonomi bagi masyarakat dan negara.

Adam Smith juga memiliki perspektif politik-ekonomi yang menjelaskan konsep kekayaan, pembagian kerja, sifat manusia, mekanisme pasar, dan juga liberalisme itu sendiri. (Deliarnov; 2006; 24). Buku Adam Smith sering dianggap sebagai buku ekonomi politik paling fenomenal dan paling banyak dikutip dalam sejarah pemikiran ekonomi politik dunia. Nyatanya, buku Adam Smith bukanlah buku ekonomi politik klasik pertama yang muncul.

Adam Smith, bapak liberalisme ekonomi, percaya bahwa pasar cenderung berkembang secara spontan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ia juga menegaskan, pemerintah tidak boleh ikut campur. Ekonomi liberal disebut doktrin dan prinsip dalam mengatur dan mengelola pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan individu (Gilvin 1987: 27).

Sejarah lahirnya liberalisme juga didorong oleh ketidakpuasan terhadap merkantilisme. Merkantilis yang mendefinisikan kekayaan dalam istilah logam mulia dianggap tidak berarti, sehingga diperlukan konsep yang lebih baik untuk mewujudkan kekayaan tersebut.

Kaum liberal muncul sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kaum merkantilis. Peran pemerintah dalam merkantilisme dipandang terlalu membatasi kebebasan individu. Dalam merkantilisme, pemerintah memiliki tugas penting untuk menjaga kesejahteraan negara melalui budidaya logam mulia. Pemerintah mengatur berbagai regulasi untuk memastikan praktik merkantilisme ini berjalan sebagaimana mestinya. Namun, hanya sedikit orang yang tampaknya mendapat manfaat dari hal ini, sementara banyak orang lainnya dibatasi kebebasan Bergeraknya, terutama dalam hal mencapai kesejahteraan individu.

Ekonomi liberal didasarkan pada gagasan bahwa ekonomi pasar, jika dibiarkan sendiri, akan berfungsi secara spontan menurut mekanisme atau hukumnya sendiri. Hukum ini dianggap sebagai bagian dari proses produksi dan perdagangan ekonomi. Ekonom liberal menolak pandangan merkantilis bahwa negara

adalah aktor dan fokus utama dalam memecahkan masalah ekonomi. Aktor utama adalah individu sebagai konsumen dan produsen. Pasar adalah arena terbuka di mana individu bertukar barang dan jasa secara kolektif. Kaum liberal kemudian menolak pandangan merkantilis “zero-sum”, pandangan bahwa keuntungan ekonomi suatu negara sebenarnya adalah kerugian ekonomi negara lain. Ekonom liberal awal menyebutnya *laissez faire*, yaitu kebebasan pasar dari segala macam pembatasan dan regulasi politik.

Singkatnya, para ekonom liberal berpendapat bahwa ekonomi pasar adalah sektor masyarakat yang otonom yang beroperasi di bawah hukum ekonominya sendiri. Pertukaran ekonomi adalah "permainan jumlah positif", dan pasar umumnya muncul untuk memaksimalkan keuntungan bagi semua individu, rumah tangga, dan bisnis yang berpartisipasi dalam pertukaran pasar. Ekonomi merupakan bidang kerjasama untuk mencapai keuntungan bersama antar negara dan juga individu. Oleh karena itu, ekonomi internasional harus didasarkan pada perdagangan bebas.

Ide pokok liberalisme adalah pemaknaan bebas, yang tercermin dalam sikap masyarakat kelas terpelajar di Barat berupa kebebasan berpikir (liberalisme lama) dan kemudian berkembang lebih jauh menjadi aspek pemaknaan yang berbeda. Jadi, dapat dikatakan bahwa liberalisme telah menjadi pemahaman umum di berbagai bidang studi. Dalam ilmu politik, konsep liberalisme mengarah pada ideologi politik yang berpusat pada individu yang

diberi hak dalam pemerintahan, termasuk hak yang sama untuk dihormati, hak untuk berpendapat dan bertindak, dan kebebasan dari keterikatan agama dan filosofis.

Liberalisme dalam konteks sosial mengarah pada etika sosial yang membela kebebasan dan kesetaraan secara umum. Sedangkan menurut Alonzo L. Hamby, PhD, guru besar sejarah di Ohio University, liberalisme sebagai paham ekonomi dan politik merupakan konsep yang menekankan tiga hal, yaitu kebebasan, persamaan dan kesempatan. Dalam ekonomi politik, liberalisme adalah salah satu teori terpenting, sering digunakan untuk mempelajari paradigma dan memahami fenomena ekonomi politik nasional dan internasional.

Namun, perlu dicatat bahwa meskipun liberalisme sering digunakan dalam studi ekonomi politik, kaum liberal sendiri menyatakan bahwa teori liberal ini tidak ada dalam studi ekonomi politik. Liberal menyangkal keberadaan teori dan kebijakan yang melibatkan hubungan antara ekonomi dan politik. Hal ini dipengaruhi oleh sejarah lahirnya liberalisme di Eropa abad 16 dan 17 yang mengkritik teori merkantilisme.

Bagi kaum liberal, pasar adalah suatu sistem atau mekanisme ekonomi yang dapat mengatur dirinya sendiri (self-regulating mechanism) sehingga tidak memerlukan campur tangan politik (pemerintah dalam hal ini). Keyakinan inilah yang membuat kaum liberal merasa bahwa ekonomi dan politik adalah dua hal yang terpisah sama sekali. Salah satu prinsip inti pemikiran liberal yang paling populer adalah *laissez-faire*.

Laissez-faire adalah ungkapan Perancis yang berarti "biarlah" atau secara harfiah "biarlah terjadi".

Istilah yang pertama kali digunakan oleh psikokrat abad ke-18 sebagai obat melawan campur tangan pemerintah dalam bisnis, kemudian menjadi salah satu prinsip liberalisme yang dikembangkan oleh Adam Smith. Laissez-faire juga identik dengan ekonomi pasar bebas yang terjadi pada pertengahan abad ke-19. Pada dasarnya liberalisme ingin membiarkan sesuatu terjadi dan membiarkan negara memainkan peran yang sangat minim (minimum state). Negara harus mengizinkan individu untuk bebas.

Itu juga berarti bahwa kaum liberal menolak keyakinan bahwa ekonomi dan politik adalah dua hal yang saling berhubungan dan saling berhubungan. Pendapat kaum liberal ini berbeda karena mereka menolak pandangan kaum merkantilis yang percaya bahwa ekonomi dan politik pada dasarnya saling melengkapi, menganggap kekuatan ekonomi sebagai basis kekuatan politik suatu negara dan sebaliknya.

Padahal, di sisi lain, para ekonom politik internasional tertarik pada realitas dunia ekonomi yang dipandang signifikan bagi dunia politik, seperti kekuasaan, nilai, dan otonomi politik masyarakat nasional. Dalam liberalisme kita menemukan seperangkat doktrin dan prinsip untuk mengatur dan mengatur pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi. Pada dasarnya, kaum liberal percaya bahwa pasar dapat beroperasi secara spontan menurut mekanisme atau "hukum" mereka sendiri.

Kaum liberal hanya mengakui pengaruh kekuatan ekonomi terhadap kekuatan negara. Negara dengan ekonomi yang kuat dapat meningkatkan kekuatannya. Selain itu, kaum liberal juga percaya bahwa ekonomi internasional dapat mempengaruhi konstelasi politik internasional. Sederhananya, dapat dipahami bahwa kaum liberal percaya bahwa ekonomi dan politik tidak saling mempengaruhi. Hanya ekonomi yang mempengaruhi politik. Sedangkan ekonomi (dalam hal ini pasar) bekerja dengan sendirinya melalui mekanisme spontanitas tanpa campur tangan politik. Hal ini juga dapat membawa kita pada posisi kaum liberal yang menolak pandangan merkantilis bahwa negara adalah aktor utama dalam menyelesaikan berbagai masalah ekonomi.

Ciri lain dari liberalisme adalah perdagangan bebas. Dalam perdagangan bebas, proses produksi dan distribusi ini harus bebas dari campur tangan negara. Negara tidak boleh mendukung siapa pun dalam transmisi atau proses produksi, bahkan jika itu menciptakan kesenjangan material. Mengenai gagasan Adam Smith dalam konsep liberalisme, harus ditekankan bahwa pasar diserahkan kepada tangan tak terlihat, bukan negara. Suatu proses ekonomi baru dianggap adil jika dilakukan oleh tangan tak terlihat atau invisible hands.

Liberalisme memiliki tiga ide dasar, yaitu (1) kehidupan, kebebasan, dan properti. Kemudian dari ketiga pokok pikiran di atas, nilai-nilai pokok yang diturunkan dari tiga nilai inti liberalisme dan pokok-pokok pikiran liberalisme dalam konteks ekonomi politik adalah sebagai berikut:

- a. Fokus perhatiannya adalah individu (The Emphasis of the Individual).
- b. Penolakan dogmatisme (menolak adat).
- c. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama di semua bidang (Menjunjung Kesetaraan Dasar Semua Manusia).
- d. Kesetaraan manusia diakui bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk menjalani hidup sesuai dengan pilihan hidupnya sendiri (memperlakukan orang lain secara setara). Pemerintah harus bertindak sesuai dengan kehendak rakyat (dengan persetujuan rakyat, pemerintah atau yang diperintah).
- e. Hukum bekerja karena negara mempunyai tugas membela dan melayani rakyat (rule of law).
- f. Negara hanyalah alat untuk menegakkan kepentingan individu dalam masyarakat (The state is a tool).

3. Merkantilisme vs Liberalisme

Kritik Terhadap merkantilisme

Teori apa pun secara faktual akan menjadi tidak berharga ketika ia tidak dapat diimplementasikan dalam fenomena yang berlangsung pada kehidupan manusia. Namun, tidak ada teori yang bebas dari kritik, termasuk merkantilisme. Teori merkantilisme, atau mazhab merkantilisme, juga mendapat banyak kritik dari para ahli.

Misalnya, pada akhir abad ke-17 dan ke-18, para pengamat mengajukan banyak pertanyaan kepada kaum merkantilis tentang

produk surplus sosial yang muncul dengan pertumbuhan produksi dan teknologi pertanian. Merkantilis sendiri merasa sulit untuk menjelaskan bagaimana kerja berhubungan dengan tanah. Kritik lain dibuat oleh Francois Quesnay dalam bukunya *Economic Table* (1758), seorang fisiokrat terkemuka yang mengatakan bahwa dia menantang asumsi merkantilis bahwa kekayaan berkembang dari perdagangan dan industri. Dia menekankan surplus yang dihasilkan di bidang pertanian.

Dia juga mengkritisi kebijakan perpajakan pemerintah. Menurutnya, pemilik tanah harus membayar pajak. Petani kecil, pedagang dan produsen yang dianggap produktif seharusnya tidak diwajibkan membayar pajak (Chilcote, 2010: 553). Salah satu kritik merkantilisme yang paling terkenal berasal dari David Hume. David Hume banyak memberikan ulasan tentang konsep kesejahteraan sebagai ide sentral komersialisme.

Berikut adalah beberapa kritik David Hume tentang merkantilisme:

- a. Kemungkinan inflasi karena akumulasi logam mulia.
- b. Penurunan jumlah barang ekspor.
- c. Volume impor meningkat. Neraca perdagangan mengalami defisit.
- d. Raja menjadi miskin.

Kekayaan seorang raja atau negara diidentikkan dengan ukuran standar emas. Gagasan utama komersialisme adalah bahwa kekayaan negara atau raja dapat dicapai dengan lebih

banyak mengekspor daripada mengimpor (surplus). Dengan surplus, negara dapat menumbuhkan lebih banyak logam berharga. Logam mulia kemudian digunakan sebagai alat pembayaran atau uang. Oleh karena itu, ketika jumlah logam mulia bertambah, berarti juga jumlah uang yang beredar bertambah, yang berarti uang itu ada.

Pasokan uang yang besar, meskipun jumlah produksinya tetap, memicu inflasi atau kenaikan harga. Kenaikan harga domestik pada akhirnya akan mempengaruhi harga barang ekspor yang juga akan meningkat. Pada akhirnya, volume ekspor juga akan menurun. Ketika volume ekspor turun dan harga barang domestik naik akibat inflasi, barang impor menjadi lebih murah. Hal ini berdampak pada peningkatan volume impor. Akhirnya terjadi defisit, kepemilikan logam mulia berkurang dan raja atau negara menjadi miskin.

Raja atau negara yang dulunya kaya atau makmur karena memiliki banyak logam mulia menjadi miskin. David Hume mengkritik transformasi raja dari kaya menjadi miskin. Menurut Hume, kondisi ini disebut sebagai “mekanisme otomatis” dari “Price Species Flow Mechanism” (PSFM). Kritik David Hume membuat teori merkantilisme menjadi tidak relevan. Berdasarkan kritik David Hume, muncul teori klasik yaitu utilitas mutlak Adam Smith.

Adam Smith sendiri juga menyampaikan kritiknya terhadap teori merkantilisme yang juga didasarkan pada PSFM

Hume. Berikut adalah beberapa kritik Adam Smith terhadap teori merkantilisme:

- a. Jumlah kekayaan suatu negara tidak boleh ditentukan oleh jumlah logam mulia yang dimilikinya. Kekayaan negara ditentukan oleh nilai produk domestik bruto dan pengaruh perdagangan luar negeri terhadap pembentukan PDB.
- b. Untuk meningkatkan PDB dan perdagangan luar negeri, pemerintah harus mengurangi gangguan perdagangan untuk menciptakan perdagangan bebas atau bebas.
- c. Perdagangan bebas menciptakan persaingan komersial yang semakin ketat, yang mendorong setiap negara untuk berspesialisasi dan pembagian kerja internasional berdasarkan keunggulan absolut masing-masing negara.
- d. Spesialisasi dan pembagian kerja internasional berdasarkan prinsip keunggulan absolut dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Pada akhirnya, ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan PDB dan perdagangan luar negeri. Pertumbuhan PDB dan perdagangan internasional identik dengan kemakmuran suatu negara.

Era merkantilisme terus mundur menjelang abad ke-17. Namun, bukan berarti nilai-nilai kebijakan perdagangan ini ditinggalkan sama sekali. Memang, merkantilisme dikembangkan melalui kritik dan masukan dari para pengamatnya. Saat ini

banyak negara yang masih menerapkan paham merkantilisme, namun dalam bentuk “merkantilisme baru”.

Neomerkantilisme yang dimaksud adalah kebijakan yang mencakup proteksionisme yang ditujukan untuk melindungi dan memajukan ekonomi industri nasional melalui kebijakan kepabeanan atau hambatan tarif dan hambatan non tarif. Saat ini, sebagai bagian dari kebijakan perlindungan ini, ada hambatan bea cukai dengan sejumlah besar bea masuk, bea anti-dumping, dan bea tambahan. Namun, praktik lindung nilai yang lebih meluas biasanya hambatan non tarif, seperti kebijakan larangan, sistem kuota, regulasi teknis, harga referensi, regulasi higienitas dan sejenisnya.

Kritik terhadap Liberalisme

Liberal ingin ekonomi atau pasar berfungsi dengan bebas, hanya mengandalkan tangan yang tidak terlihat. Tangan tak kasat mata mampu membuat pasar menemukan titik ekuilibriumnya sendiri dan jika timbul masalah, tangan tak kasat mata juga akan mengurus dirinya sendiri untuk membawa pasar kembali ke titik ekuilibrium semula. Semuanya bekerja secara otomatis karena individu bebas bereksperimen.

Namun, menurut kaum liberal, dapatkah mereka terbukti bisa diterapkan dalam sistem ekonomi politik negara? Bisakah negara benar-benar melepaskan campur tangannya dalam perekonomian dan menyerahkan berbagai masalahnya pada mekanisme pasar spontan? Nyatanya, perdagangan bebas yang

hanya bergantung pada tangan tak terlihat saja tidak cukup. Kritik terhadap liberalisme datang dari berbagai kalangan, antara lain Marxis, sosialis, dan juga neoliberal.

Kritik pertama terhadap liberalisme adalah bahwa kaum liberal melihat dunia terlalu normatif tentang bagaimana dunia seharusnya bekerja. Liberal membawa logika berpikir di tingkat individu dan domestik ke tingkat internasional, yang terlalu normatif. Hal ini karena komunitas atau masyarakat dalam suatu negara merupakan entitas yang terdiri dari banyak individu, sehingga logika berpikir untuk mencipta sangat berbeda. Akan terlalu sulit untuk membuat kebijakan luar negeri dan melaksanakan hubungan internasional dengan mengadopsi logika masyarakat luas.

Kritik lain datang dari kalangan liberal yang sangat mengidolakan demokrasi dan hubungannya dengan perilaku pemerintah. Orang-orang di negara itu tidak selalu memiliki pendapat yang sama. Pikiran banyak orang juga menghasilkan pemikiran yang berbeda-beda, sehingga sulit mencapai konsensus nasional untuk menentukan arah politik luar negeri. Apalagi dalam sistem hubungan luar negeri, menyerahkan keputusan-keputusan penting kepada publik merupakan tindakan yang gegabah, karena tidak semua orang memahami dan mempertimbangkan konteks hubungan kenegaraan secara menyeluruh.

Kritik terhadap liberalisme juga mulai banyak dimunculkan ketika penerapan liberalisme menunjukkan kegagalan yang nyata.

Sejak awal abad ke-19, ideologi liberalisme telah menyebar dengan cepat sejak kelahirannya. Tidak hanya di benua Eropa, liberalisme mulai banyak diterapkan di negara lain, termasuk Amerika Serikat. Namun dalam perjalanannya, Amerika Serikat yang juga menerapkan ide-ide kaum liberal tersebut ternyata akan menghadapi masalah ekonomi yang agak sulit, karena mereka hanya bergantung pada tangan tak terlihat.

Tercatat bahwa pada tahun 1929, ketika Amerika Serikat menerapkan gagasan liberalisme, mereka mengalami krisis yang sangat serius. Wall Street mengalami krisis parah yang dikenal sebagai Great Depression. Kegagalan pemerintah untuk mengarahkan ekonomi mempengaruhi pasar saham, yang terjadi dalam sistem yang salah, yang pada gilirannya menyebabkan krisis di banyak bidang ekonomi lainnya.

Depresi Hebat adalah kegagalan besar sejarah ekonomi Amerika Serikat, serta kegagalan besar liberalisme. Krisis besar ini ditandai dengan runtuhnya Wall Street pada bulan Oktober 1929, yang kemudian berdampak negatif pada semua sektor ekonomi. Runtuhnya pasar saham Wall Street dipicu oleh krisis ekonomi yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan banyaknya barang yang tidak terjual. Ini kemudian tumbuh menjadi rangkaian krisis yang panjang hingga momentumnya adalah aksi jual besar-besaran di saham Wall Street. Keruntuhan pasar saham berlanjut selama tiga tahun ke depan. Banyak bank bangkrut dan harus tutup. Setidaknya 11.000 bank dari total 25.000 di Amerika Serikat harus ditutup.

Daya beli masyarakat menurun. Terjadi PHK di mana-mana. Jumlah pengangguran terus bertambah. Kelaparan ada di mana-mana. Gelandangan dan pengemis mulai menjamur di berbagai tempat. Hal ini tampaknya merupakan fenomena besar yang menunjukkan kegagalan sistem pasar bebas.

Kegagalan itu kemudian melahirkan gerakan baru melawan keberadaan sistem pasar bebas yang "murni". Kita tidak dapat meninggalkan pasar sepenuhnya pada mekanisme spontan dan sepenuhnya menghilangkan peran pemerintah. Negara diperlukan untuk mencegah gangguan pasar dalam sistem pasar bebas. Dari sini kita mengetahui bahwa liberalisme sudah tidak ideal lagi dan telah melahirkan konsep baru liberalisme yang dikenal dengan neoliberalisme.

Neoliberalisme menempatkan pemerintah dalam peran menjaga sistem ekonomi kapitalis melalui regulasi dan kekuasaan, dan memastikannya tetap pada jalurnya. Negara juga memiliki perannya sendiri untuk memastikan kelangsungan hak dan kebebasan individu. Kemudian pada tataran hubungan internasional, stabilitas perekonomian dunia diserahkan kepada lembaga internasional. Ini menciptakan benang merah antara bisnis dan politik. Dengan kata lain, terdapat saling integrasi antara bisnis dan politik, yang dapat saling mempengaruhi. Bisnis dan politik pada dasarnya saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan.

C. Rangkuman

Kebijakan perdagangan internasional secara garis besar terbagi menjadi dua kubu, yaitu liberalisme dan merkantilisme. Teori merkantilisme sudah ada sejak sebelum liberalisme, sedangkan teori liberalisme muncul sebagai bentuk kritik terhadap teori merkantilisme. Teori komersial merkantilisme sudah ada sejak abad ke-18 dan berlanjut hingga abad ke-18 sebelum munculnya liberalisme, namun bukan berarti teori ini hilang begitu saja, hingga abad ke-20 masih ada beberapa praktik teori ini dan Pengaruhnya. Teori ekonomi nasional. Pada saat yang sama, teori komersial liberal muncul dan berkembang sejak abad ke-18 sebagai bentuk kritik dan penentangan terhadap praktik ekonomi merkantilisme pada masa itu. Saat itu, merkantilisme memiliki sistem ekonomi berbasis emas. Merkantilisme berfokus pada peningkatan kekayaan sebanyak mungkin dengan memaksimalkan ekspor dan membatasi impor atau bahkan tanpa impor. Dalam teori ini, orang bekerja untuk perekonomian nasional negara. Teori liberalisme tumbuh dari ketidakpercayaan Adam Smith terhadap intervensi ekonomi pemerintah dan menganggapnya berbahaya.

Teori perdagangan liberal dan merkantilisme saling bertentangan dan memiliki pandangan yang berlawanan. Pada hakekatnya teori merkantilisme ini menekankan peran dan kontrol negara dalam perekonomiannya, artinya bisnis dan perekonomian suatu negara tidak dapat dipisahkan dari negara

atau kekuatan politik, baik secara domestik maupun global. Sedangkan teori liberalisme sebaliknya, liberalisme mendukung adanya kebebasan individu dalam mencapai tujuan ekonominya. Jika dalam teori bisnis merkantilisme pemerintah berhak melakukan intervensi untuk memperoleh kekuatan ekonomi nasional, maka dalam teori bisnis liberal menekankan bahwa pemerintah hanya membutuhkan peran kecil dalam kegiatan ekonomi rakyatnya untuk mencapai efisiensi yang maksimal.

D. Pendalaman Materi

1. Apa saja ide pokok dalam merkantilisme?
2. Apa saja ide pokok dalam liberalisme?
3. Bagaimana kritik terhadap merkantisme?
4. Bagaimana kritik terhadap liberalisme?

Bab 3

-

Marxisme dan Neo Klasik dalam Ekonomi Politik Internasional

A. Indikator Pembelajaran

Mampu mendiferensiasikan pemikiran Marxisme dan Neo-klasik dalam Ekonomi Politik Internasional Ekonomi Politik Internasional

1. Ketepatan menjelaskan pemikiran, karakteristik, dan ciri teori Marxisme dalam Ekonomi Politik Internasional
2. Ketepatan menjelaskan pemikiran, karakteristik, dan ciri teori Neo-klasik dalam Ekonomi Politik Internasional
3. Ketepatan mendiferensiasikan pemikiran marxisme dan neo-klasik dalam ekonomi politik internasional

B. Materi Pembelajaran

1. Perspektif Marxisme

Marxisme sering disamakan dengan sosialisme karena keduanya seringkali memiliki kesamaan konsep dasar. Namun, sosialisme dan Marxisme pada dasarnya berbeda. Marxisme adalah ideologi yang didasarkan pada ajaran Karl Marx. Itulah mengapa disebut Marxis atau ajaran Marx. Karl Marx hadir bersama era industrialisasi yang membawa perubahan besar pada sistem ekonomi dunia, termasuk munculnya pemikir baru seperti Karl Marx (1818-1883). Pemikiran Karl Marx sebenarnya tidak benar-benar segar dan baru. Apa yang coba diungkapkan oleh Karl Marx sebenarnya adalah gagasan komunitas di dalam komunitas, sebagai pemikiran sosialis.

Namun, Marx sendiri mengembangkan gagasan sosialisme dalam bentuk sistem. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang sosialisme dalam bentuk sistem, seringkali merujuk pada ajaran Karl Marx dalam bentuk Marxisme. Di sini, kemudian, terlihat bahwa perbedaan mendasar antara sosialisme dan Marxisme, selain yang asli, terletak pada cara berpikir. Dalam sosialisme, garis pemikirannya lebih luas, mulai dari konsep kebersamaan. Pada saat yang sama, Marxisme lebih menekankan bagaimana sosialisme dapat diimplementasikan dalam sistem yang komprehensif dalam kehidupan masyarakat.

Sejarah Marxisme sendiri dipandu oleh perkembangan industrialisasi di Inggris pasca Revolusi Industri. Banyak gagasan Karl Marx yang merupakan semacam sanggahan terhadap gagasan klasik berorientasi liberal yang membangun ekonomi mereka berdasarkan mekanisme pasar. Melalui ide-idenya, Karl Marx disebut sebagai pelopor utama gerakan sosialis ilmiah. Popularitas Marx dimulai ketika ia menerbitkan buku pertamanya bersama pemodal Marx, Friedrich Engels.

Buku itu berjudul *The Communist Manifesto* pada tahun 1847. Dalam buku itu, Marx melontarkan beberapa kritik terhadap gagasan Adam Smith dan konsep kapitalisme yang dia promosikan. Buku ini juga menggambarkan konflik antar kelas. Marx juga mengatakan bahwa negara adalah alat penindas. Selain *Manifesto Komunis*, banyak buku lain berisi ide-ide Marx, semuanya mengarah pada konsep sosialis. Salah satu karya Marx yang paling populer adalah buku berjudul *Das Kapital* yang diterbitkan pada tahun 1867. Karya-karya Marx inilah yang kemudian menjadi dasar munculnya ideologi Marxis, atau Marxisme.

Padahal, Marx sendiri tidak pernah berbicara langsung tentang ideologi Marxisme. Konsep pemikirannya juga tidak dirancang untuk menjadi ideologi atau ideologi yang disebut Marxisme. Istilah Marxisme sebagai ideologi baru berkembang setelah kematian Marx pada tahun 1883. Gagasan Marx yang menarik perhatian ini mulai dipadatkan menjadi ideologi baru, yang oleh para pemikir Jerman disebut Marxis.

Karena sejarah ini, seringkali sulit untuk mendefinisikan Marxisme dengan tepat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ajaran Marxis pada dasarnya bertujuan untuk mendamaikan realitas, teori, dan gagasan dalam masyarakat ideal melalui sistem komunis. Perlu dicatat bahwa filosofi Karl Marx didasarkan pada sebagian besar dialektika yang dikembangkan oleh Hegel pada tahun 1818. Yang diwarisi Marx dari Hegel adalah filsafat idealisme dan sejarah.

Filosofi Hegel menjelaskan bagaimana keresahan sosial berhubungan dengan masa depan peradaban. Gagasan Hegel tentang siklus perubahan sejarah kemudian mengilhami gagasan Marx. Marx memikirkan konsep revolusioner saat merumuskan teori sosialnya. Secara khusus, ideologi Marxisme muncul dari berbagai kritik yang dilontarkan oleh Karl Marx terhadap Adam Smith. Banyak kritik Karl Marx diarahkan pada gagasan Adam Smith tentang pendewaan ekonomi pasar. Dalam usahanya mengkritisi gagasan kapitalisme, Marx menggunakan banyak argumentasi dari berbagai disiplin ilmu. Ia mencoba membuktikan bahwa ide-ide kapitalisme memang “busuk dari dalam” dan mencerminkan sistem yang tidak adil.

Berbagai disiplin ilmu yang digunakan oleh Karl Marx untuk menantang gagasan kapitalisme antara lain: Dari sudut pandang moral, Marx berpendapat bahwa kapitalisme mewarisi ketidakadilan dari dalam. Di balik ini adalah ketidakpedulian kapitalisme terhadap ketimpangan sosial yang tumbuh di masyarakat. Dari perspektif sosial, Marx menemukan bahwa

kapitalisme adalah sumber konflik kelas. Konflik ini dapat timbul antara borjuasi dan proletariat, antara pemilik tanah dan petani, dan antara kapitalis dan pekerjanya. Hal ini terjadi karena satu pihak bertindak sebagai penindas dan pihak lain bertindak sebagai tertindas.

Dari segi ekonomi, Marx melihat kapitalisme sebagai alat kaum kapitalis, yang dirancang hanya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya bahkan untuk menekan buruh sekuat tenaga. Marx menggunakan perspektif yang berbeda untuk mempresentasikan idenya, yang memperluas konsep Marx tentang "sosialisme". Marx juga menganggap metode deduktif yang dia gunakan jauh lebih unggul daripada metode para ekonom klasik. Marx dan para pengikutnya percaya bahwa dunia harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tertinggi. Atas dasar ini, Marxisme menawarkan ide atau sistem yang didasarkan pada metode totalitas, dan bukan hanya basis ekonomi.

Sebagai teori yang muncul sebagai tanggapan terhadap para pemikir klasik, banyak ajaran Marxisme yang didasarkan pada kritik terhadap ajaran kaum liberal klasik tersebut. Kritik ini terutama ditujukan bagi bentuk kapitalisme Adam Smith. Marx melihat kapitalisme sebagai sebuah sistem dengan banyak kelemahan. Berikut ini adalah beberapa kritik Karl Marx terhadap kapitalisme, yang menggambarkan cara pemikiran ideologi Marx.

Kapitalisme menciptakan kelas-kelas dalam masyarakat

Marx percaya bahwa pembentukan kelas sosial dalam masyarakat adalah hasil dari kapitalisme. Kapitalisme membentuk

kelas menurut sudut pandang ekonomi. Yang paling jelas adalah munculnya kelas penguasa dan kelas buruh atau buruh.

Kapitalisme membuat distribusi kekayaan tidak merata

Mereka yang ingin mendapat untung sebanyak-banyaknya menekan para buruh. Pada akhirnya para pekerja hampir tidak mendapat gaji yang cukup. Marx mendasarkan alasannya pada teori Ricardo, yang mengusulkan tingkat upah yang rendah. Ricardo menjelaskan bahwa dalam subsistem kapitalisme ini, tingkat upah yang begitu rendah ditetapkan pada nilai yang hanya ada untuk bertahan hidup. Bentuk ini disebut "batang besi" atau jumlah batang besi bahkan sesuai dengan biaya bahan bakar mesin atau jumlah "biaya pakan". Artinya, ganti rugi yang dibayarkan kepada pemilik modal atau kapitalis jauh lebih tinggi daripada ganti rugi yang dibayarkan kepada pemilik buruh atau pekerja. Pemilik modal semakin kuat dan kuat, sementara pemilik tenaga kerja semakin lemah. Kapitalisme cenderung mendistribusikan kekayaan secara tidak merata. Akhirnya, sistem ini juga menyebabkan efisiensi bertingkat.

Kapitalisme memungkinkan kelas penguasa untuk mengeksploitasi

Dalam kapitalisme yang berorientasi ekonomi, kelas penguasa atau kaum kapitalis berusaha mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Semakin banyak kapitalis besar berjuang untuk mendapatkan keuntungan, semakin besar tekanan pada para pekerja. Artinya, konsep ini memungkinkan kelas penguasa mengeksploitasi buruh. Dengan kata lain, menurut Marx,

kapitalisme adalah suatu bentuk eksploitasi terhadap pekerja. # Kapitalisme memicu konflik kelas. Marx percaya bahwa negara kapitalis akan bergabung dengan para penguasa. Lalu mengapa? Ini karena kelas ekonomi yang dominan cenderung mendapatkan kekuatan politik. Ini karena uang atau kekayaan dipandang sebagai bentuk kekuasaan. Negara kapitalis yang "busuk dari dalam" ini memiliki sistem yang tidak adil. Kapitalisme memicu konflik kelas. Satu sisi bertindak sebagai penindas dan di sisi lain adalah yang tertindas (orang yang tertindas). Ini terjadi karena kaum kapitalis meraup untung sebanyak-banyaknya dengan menindas kaum buruh.

Kapitalisme mengasingkan pengalaman pekerja

Sistem yang diciptakan oleh kapitalisme menyebabkan pekerja mengalami keterasingan. Buruh yang dijadikan instrumen atau alat untuk memenuhi kebutuhan kaum kapitalis cenderung dieksploitasi untuk menyelesaikan pekerjaan dengan secepat dan sebaik mungkin. Setelah itu, karyawan hanya fokus pada pekerjaannya dan sedikit berinteraksi dengan kehidupan sosial atau orang lain. Hal ini memaksa karyawan untuk menjadi terisolasi dan tidak dapat berkembang. Dengan kata lain, karyawan terasing dari sifat dasar manusia mereka..

Kapitalisme merusak diri sendiri

Marx menolak pandangan klasik bahwa kapitalisme adalah suatu sistem yang dianggap mandiri (self-evolving). Di mata Marxisme, kapitalisme dikatakan merusak diri sendiri. Situasi ini disebabkan oleh tekanan kaum kapitalis terhadap begitu banyak

buruh. Ini meyakinkan Karl Marx dan bahkan menyuarakan ramalannya bahwa revolusi buruh akan terjadi. Untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, kaum kapitalis bahkan lebih menekan kaum buruh. Kaum buruh yang semakin tertindas oleh para kapitalis ini tentu tidak akan tinggal diam. Akan ada perlawanan sehingga pada akhirnya sistem ini akan hancur sendiri.

2. Perspektif Neo-Klasik

Perspektif Neo-Klasik muncul dari siklus kritik mengkritik, yang muncul atas kritikan Marx terhadap Liberalisme. Selanjutnya, ide-ide Marx dan Engels pun tidak lepas dari pemikiran penolakan. Bahkan, teori yang dikembangkan oleh Marx dan Engels juga ditolak oleh kaum sosialis sendiri dan disempurnakan oleh kaum kapitalis liberal.

Pemikir ekonomi liberal kemudian dimasukkan dalam kelompok pemikir ekonomi yang disebut teori neoklasik. Disebut neoklasik atau teori klasik baru karena pemikiran neoklasik tersebut juga merupakan pembaharuan dan pembelaan pemikiran klasik dalam menanggapi kritik Marxis. Para ahli neoklasik pada masa itu mencoba mengkaji pokok-pokok teori klasik yang dikritik oleh Marx, yaitu hubungan antara nilai kerja dan tingkat upah. Marx melihat tingkat upah dan nilai kerja sebagai alasan utama yang akan merusak kehormatan kaum kapitalis.

Beberapa ahli yang mencoba melakukan penelitian antara lain W. Stanley Jevons, Leon Walras, Karl Menger, dan Alfred Marshall. Keempat ahli ini menyelidiki pokok bahasan yang sama, yaitu teori nilai-lebih Marx. Secara historis, teori klasik dan neoklasik pada dasarnya terkait. Keduanya memiliki persamaan jika persamaannya adalah bahwa kegiatan ekonomi merupakan suatu sistem yang berdiri sendiri.

Hanya saja kaum neoklasik memperbarui teori klasik, menggunakan ciri-ciri utilitarian untuk menjawab pertanyaan tentang sifat dan tujuan ekonomi pasar. Pemikir neoklasik mendalilkan bahwa "ekonomi" adalah transaksi pribadi yang terjadi untuk memaksimalkan keuntungan bagi individu. Pada saat yang sama, "politik" dipahami sebagai pelaksanaan otoritas publik untuk mencapai tujuan ekonomi tersebut.

Secara historis, teori klasik dan neoklasik pada dasarnya terkait. Keduanya memiliki persamaan jika persamaannya adalah bahwa kegiatan ekonomi merupakan suatu sistem yang berdiri sendiri. Hanya saja kaum neoklasik memperbarui teori klasik, menggunakan ciri-ciri utilitarian untuk menjawab pertanyaan tentang sifat dan tujuan ekonomi pasar. Pemikir neoklasik mendalilkan bahwa "ekonomi" adalah transaksi pribadi yang terjadi untuk memaksimalkan keuntungan bagi individu. Pada saat yang sama, "politik" dipahami sebagai pelaksanaan otoritas publik untuk mencapai tujuan ekonomi tersebut.

Pemikir neoklasik menjelaskan bahwa agar pasar berfungsi dalam pasar yang sepenuhnya kompetitif, pemerintah harus

mengarahkan ekonomi ke arah yang ideal. Namun, intervensi negara ini hanya disorot dalam proses dan keputusan politik untuk memperbaiki pasar.

Hal ini ditegaskan oleh Capporaso & Levine (1993) bahwa *“when the market fails, it is the function of the political process to carry out the mission of the market by other means”*. Namun, para ahli neoklasik tidak membahas perlunya intervensi pemerintah dalam masalah sosial seperti redistribusi pendapatan, pengentasan kemiskinan, kesenjangan sosial, peningkatan tingkat kesehatan masyarakat, promosi pendidikan, masalah lingkungan, dan sejenisnya.

Para pemikir neoklasik ini terutama membahas eksternalitas, barang publik, dan pasar persaingan tidak sempurna secara umum. Proses politik yang diusulkan untuk dilaksanakan oleh pemerintah salah satunya dengan melarang kegiatan-kegiatan yang dengan sendirinya menimbulkan eksternalitas. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan memajaki kegiatan yang menimbulkan eksternalitas negatif, mendukung kegiatan yang berdampak positif, dan menggunakan hak milik. Pada saat yang sama, jika masalahnya tentang barang publik, pemerintah dapat melakukan pembelian.

Berbagai fungsi pemerintah ini harus dilakukan untuk mempertahankan pasar dalam pasar yang sepenuhnya kompetitif. Karena wajar jika suatu perusahaan berusaha mencapai laba yang maksimal dengan beberapa cara. Korporasi mungkin berusaha mempengaruhi harga dan produksi dengan memonopoli dan

mengendalikan teknologi dan dengan mengendalikan modal dan pembiayaan korporasi mereka sendiri.

3. Marxisme vs Neo-Klasik

Kritik terhadap Marxisme

Sama seperti Marxisme mengkritik kaum liberal klasik, demikian pula Marxisme tampaknya tidak bebas dari kritik. Beberapa pemikir akan berpendapat bahwa ajaran Marx kurang ideal dan bahkan memiliki banyak kekurangan. Beberapa kritik terhadap Marxisme adalah sebagai berikut:

Dogmatis afektif

Setelah era Karl Marx, muncul pemikir yang mengusung teori kritis. Teori kritis ini mengkritik Marxisme. Menurut teori kritis, terdapat kelemahan dalam Marxisme secara umum karena ideologi tersebut menjiplak secara kasar analisis Marx. Kata-kata Karl Marx digunakan sebagai ideologi dan coba diterapkan pada masyarakat modern.

Penerapan langsung inilah yang menjadikan Marxisme sebagai ideologi lebih dogmatis daripada ilmiah. Analisis yang dikemukakan oleh Critical Theory sendiri merupakan reinterpretasi dari teori dasar Karl Marx, yaitu pembebasan manusia dari berbagai belenggu penindasan.

Gagasan revolusi sosial otomatis tidak rasional

Menurut Marx, revolusi sosial secara otomatis menghancurkan kapitalisme yang "busuk dari dalam". Revolusi

sosial yang dilakukan oleh kaum buruh ini akan terjadi secara otomatis, sehingga pada akhirnya akan menggantikan tatanan kapitalis itu sendiri. Revisionis melihat ide ini sebagai kelemahan Marxisme, dan tampaknya dilebih-lebihkan atau tidak masuk akal. Gagasan bahwa keruntuhan kapitalisme dapat terjadi secara otomatis adalah absurd.

Lebih lanjut, merujuk pada pendapat bahwa sosialisme hanya akan muncul ketika kapitalisme runtuh berarti revolusi sosial ini tidak akan terjadi secara otomatis selama kapitalisme dapat mempertahankan nilai lebihnya. Bernstein menjelaskan bahwa kapitalisme tidak menuju keruntuhan selama negara-negara pendukung kapitalisme terus mempertahankan berbagai kebijakan antimonopoli dan pasar bebas. Sederhananya, adalah berlebihan atau bahkan tidak masuk akal untuk mengharapakan revolusi sosial terjadi secara otomatis.

Terlalu banyak materialisme ketuhanan dan mengabaikan pemikiran

Konsep materialisme Marx mendewakan materi seperti bagian dari aspek ekonomi. Bahkan, Marx mengabaikan pentingnya ide atau gagasan dan kontribusinya terhadap sejarah. Marx menyatakan bahwa realitas adalah material dan revolusi sosial dapat terjadi terutama karena aspek material ini.

Materi atau ekonomi adalah satu-satunya hal yang penting dan itulah standar kehidupan manusia, bukan pemikiran atau gagasan. Sikap Marx yang mengklaim semua kepentingan hanya sebagai bagian dari kepentingan ekonomi dianggap berlebihan

dan tidak logis. Marx percaya, secara langsung atau tidak langsung, bahwa kekuatan politik hanyalah alat bagi kekuatan ekonomi untuk berfungsi. Demikian juga dalam hubungan sosial dan budaya, semuanya didasarkan pada perspektif materialistis.

Dari sudut pandangnya, Marx menyatakan bahwa kekuatan sejarah dan revolusi masyarakat tidak ditentukan oleh ide atau persepsi, atau lebih dari cita-cita kebebasan. Ketiadaan ide atau gagasan dan sikap pendewaan materi yang berlebihan merupakan cikal bakal ajaran Marx.

Kritik terhadap Neo-Klasik

Sejak ajaran neoklasik berkembang, banyak negara yang mengadopsinya di negaranya masing-masing. Beberapa negara mengalami perkembangan ekonomi yang pesat setelah menerapkan prinsip-prinsip neoklasik ini di negara mereka sendiri. Namun, hal-hal yang awalnya positif lambat laun tidak berlanjut.

Pada tahun 1930-an, Amerika Serikat yang juga menerapkan doktrin neoklasik mengalami keruntuhan ekonomi yang mengejutkan dunia. Perekonomian Amerika, khususnya pasar saham, dilanda depresi hebat. John Maynard Keynes (1883-1946), seorang ekonom Inggris, mencoba mencermati Great Depression di Amerika Serikat. Keynes menyimpulkan bahwa depresi ekonomi Amerika Serikat disebabkan oleh permintaan agregat jauh lebih sedikit daripada penawaran agregat.

Hal ini menyebabkan perekonomian berada dalam keadaan ekuilibrium rendah. Hal ini kemudian membuat Keynes mengkritik sistem ekonomi pasar yang mengatur sendiri sebagaimana diadopsi oleh klasik dan neoklasik. Untuk mengatasi masalah tersebut, Keynes menawarkan solusi, salah satunya dengan menerapkan kebijakan fiskal yang lebih ekspansif. Artinya pemerintah memiliki peran yang jauh lebih luas dalam kaitannya dengan perekonomian, salah satunya adalah kebijakan fiskal.

Misalnya, negara dapat bertindak di pasar uang dengan melihat ekspektasi selain tingkat bunga. Di pasar tenaga kerja, pemerintah dapat mempengaruhi penetapan kebijakan upah minimum. Prinsip-prinsip Keynesian ini kemudian dikenal sebagai prinsip-prinsip Keynesian. Pada dasarnya, baik neoklasik maupun Keynesian sepakat bahwa pasar tidak beroperasi dengan asumsi persaingan sempurna, seperti yang dilakukan klasik. Hanya saja Keynesian melihat ketidaksempurnaan pasar ini melalui lensa yang jauh lebih buruk daripada neoklasik.

Neoklasik berharap intervensi pemerintah akan terbatas pada mengatasi gangguan pasar. Seorang Keynesian mengharapkan intervensi yang jauh lebih besar dari pemerintah. Pemerintah harus berpartisipasi penuh dalam mengatasi berbagai kelemahan sistem pasar persaingan dan lebih memperhatikan kelompok rentan dalam masyarakat, seperti orang miskin, bodoh, lemah.

Pengaruh doktrin Keynesian ini tampak pada semakin meningkatnya campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi.

Bahkan, sejak tahun 1960-an hingga saat ini, banyak pemerintah di seluruh dunia yang secara aktif terlibat dalam perencanaan kebijakan seperti:

- a) kebijakan ekonomi, seperti kebijakan fiskal, moneter dan perdagangan internasional;
- b) membuat peraturan dan undang-undang terkait perdagangan untuk memerangi praktik perdagangan yang tidak adil;
- c) hukum perburuhan dan ketenagakerjaan untuk melindungi pekerja;
- d) undang-undang perlindungan konsumen terhadap praktik bisnis yang merugikan konsumen;
- e) undang-undang perlindungan lingkungan dan lingkungan;
- f) hak asasi manusia dan sejenisnya;
- g) menciptakan lingkungan bisnis yang menguntungkan;
- h) sebagai pelaku ekonomi, misalnya melalui BUMN/BUMD.

Jika melihat berbagai usulan Keynesian, tampaknya memiliki kesamaan dengan sosialisme, yang melibatkan begitu banyak pemerintahan dalam urusan ekonomi. Namun, harus dilihat dengan jelas bahwa doktrin Keynesian ini sangat berbeda dengan sosialisme. Bahkan, Keynesianisme seringkali berasimilasi dengan aliran neoklasik, yang mencoba mengkaji kembali ajaran-ajaran klasik dengan memasukkan peran pemerintah. Otoritas publik atau negara semakin mengambil tugas yang semula

dilakukan oleh pasar. Dalam situasi ini, dapat diasumsikan bahwa masalah ekonomi kini telah menjadi masalah politik.

Namun, perlu dipahami juga bahwa ekonomi politik Keynesian bukanlah upaya mempolitisasi ekonomi, melainkan menempatkan politik di atas ekonomi sebagai paradigma utama. Doktrin Keynesian ini merupakan upaya untuk merangsang refleksi atas kekhususan dan keterbatasan pasar. Menurut Keynes, kegagalan pasar tidak boleh dilihat sebagai masalah politik. Keynes melihat masalah batasan pasar sebagai sesuatu yang membutuhkan perlakuan kolektif yang akan ditimbulkan oleh proses politik ini.

C. Rangkuman

Ajaran Marxis bersumber dari pemikiran Karl Marx yang mengkritik liberalisme, yang bertujuan untuk mendamaikan realitas, teori, dan gagasan dalam masyarakat ideal melalui sistem komunis. Marx dan para pengikutnya percaya bahwa dunia harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tertinggi. Atas dasar ini, Marxisme menawarkan ide atau sistem yang didasarkan pada metode totalitas, dan bukan hanya basis ekonomi.

Adapun teori neoklasik merupakan kumpulan pemikiran ekonomi liberal yang menghadirkan teori klasik baru karena merupakan pembaharuan dan pembelaan pemikiran klasik dalam menanggapi kritik Marxis. kaum neoklasik memperbarui teori klasik, menggunakan ciri-ciri utilitarian untuk menjawab

pertanyaan tentang sifat dan tujuan ekonomi pasar. Pemikir neoklasik mendalilkan bahwa "ekonomi" adalah transaksi pribadi yang terjadi untuk memaksimalkan keuntungan bagi individu. Pada saat yang sama, "politik" dipahami sebagai pelaksanaan otoritas publik untuk mencapai tujuan ekonomi tersebut.

Marxisme dan Neo Klasik keduanya tidak lepas dari kritik. Marxisme dikritik karena dinilai memuat dogmatisme afektif yang tidak relevan untuk penerapan langsung. Gagasan revolusi sosial otomatis dinilai tidak rasional. Marx juga banyak melandaskan pemikiran pada terlalu banyak materialisme ketuhanan dan mengabaikan pemikiran.

Sedangkan pada ajaran Neoklasik, kritikan salah satunya muncul dari Keynesian. Neoklasik berharap intervensi pemerintah akan terbatas pada mengatasi gangguan pasar. Seorang Keynesian mengharapkan intervensi yang jauh lebih besar dari pemerintah. Pemerintah harus berpartisipasi penuh dalam mengatasi berbagai kelemahan sistem pasar persaingan dan lebih memperhatikan kelompok rentan dalam masyarakat, seperti orang miskin, bodoh, lemah.

Doktrin Keynesian ini merupakan upaya untuk merangsang refleksi atas kekhususan dan keterbatasan pasar. Menurut Keynes, kegagalan pasar tidak boleh dilihat sebagai masalah politik. Keynes melihat masalah batasan pasar sebagai sesuatu yang membutuhkan perlakuan kolektif yang akan ditimbulkan oleh proses politik ini.

D. Pendalaman Materi

- 1) Apa ide dasar dari perspektif Marxisme?
- 2) Apa ide dasar dari perspektif Neoklasik?
- 3) Jelaskan kritikan yang muncul untuk kaum Marxisme!
- 4) Jelaskan kritikan yang muncul untuk kaum Neoklasik!

Bab 4

-

Teori Struktualisme dan Dependensia dalam Ekonomi Politik Internasional

A. Indikator Pembelajaran

Mampu menafsirkan teori Struktualisme dan Dependensia dalam Ekonomi Politik Internasional

1. Ketepatan menafsirkan pemikiran, karakteristik, dan ciri teori Struktualisme dalam Ekonomi Politik Internasional
2. Ketepatan menafsirkan pemikiran, karakteristik, dan ciri teori Dependensia dalam Ekonomi Politik Internasional

B. Materi Pembelajaran

Kajian strukturalisme dependensia muncul di Amerika Latin pada tahun 1960-an. Alasannya adalah meningkatnya kemiskinan di Amerika Latin. Faktanya, beberapa negara di dunia, termasuk Amerika Latin, mengadopsi liberalisme saat itu. Nyatanya, liberalisme tidak memiliki efek yang sama pada negara-negara yang mempraktikkannya. Beberapa negara kaya dan makmur, yang lain tidak. Negara-negara berkembang seperti negara-negara Amerika Latin telah menunjukkan banyak kesalahan.

Latar belakang munculnya strukturalisme dependensia berawal dari fenomena buruk yang dialami di Amerika Latin, yang mendapat perhatian khusus di PBB. Sebuah inisiatif diluncurkan untuk menemukan akar masalah kemiskinan. Kemudian Komisi PBB untuk Amerika Latin, yaitu. ECLA - Komisi Ekonomi untuk Amerika Latin (sekarang ECLAC) didirikan.

Di bawah arahan Raul Prebisch, ECLA memiliki tugas menyelidiki latar belakang kemiskinan dan permasalahan ekonomi di negara-negara Amerika Latin. Setelah beberapa penyelidikan, pihak asing ditemukan mengeksploitasi negara-negara Amerika Latin. Eksploitasi ini terjadi sebagai akibat dari hubungan ekonomi yang tidak setara atau tidak adil. Ekonomi pasar bebas yang merupakan konsep liberalisme ternyata

berdampak pada kemiskinan dan keterbelakangan negara-negara berkembang atau miskin. Negara-negara ini bergantung pada negara-negara maju.

Hasil studi ECLA ini kemudian memunculkan paradigma baru. Pada tahun 1980 paradigma baru ini muncul dan dikenal sebagai “ekonomi politik radikal”. Ia memiliki pendekatan politik-ekonomi dengan ketergantungan strukturalisme (ketergantungan).

Munculnya strukturalisme dependensia ini merupakan konsekuensi dari era liberalisasi ekonomi yang pesat. Di sisi lain, perkembangan ekonomi negara-negara industri berlangsung cepat. Di sisi lain, bagaimanapun, ada orang-orang yang cacat dengan keuangan mereka. Akibatnya, terjadi saling ketergantungan antar negara. Ini semakin meningkatkan kemiskinan massal. Dalam aliran dependen strukturalisme diyakini bahwa faktor utama penyebab kemiskinan dan keterbelakangan negara-negara di kawasan Amerika Latin adalah eksploitasi orang asing. Eksploitasi ini adalah hasil dari hubungan ekonomi yang tidak adil.

1. Perspektif Strukturalisme

Strukturalisme adalah sebuah konsep yang menyangkal bahwa ketimpangan struktural adalah sumber ketidakadilan sosial ekonomi, seperti yang diyakini oleh Neoklasikisme. Uusklassinen menghargai prinsip kepentingan pribadi, mekanisme pasar bebas, persaingan ketat, dan prioritas pertumbuhan di atas kesetaraan.

Kaum strukturalis menolak mekanisme pasar bebas. Kaum strukturalis percaya bahwa mekanisme pasar bebas memiliki kecenderungan inheren untuk menciptakan ketidakadilan sosial ekonomi. Menurut strukturalis, pasar bebas tidak mahakuasa atau mahakuasa, mengatur sendiri atau mengoreksi diri sendiri.

Pasar bebas dipandang tidak mampu mengatasi ketimpangan struktural dan justru mendorong polarisasi sosial ekonomi. Artinya, ketimpangan sosial semakin meningkat. Pasar bebas adalah konsep yang mempromosikan inklusi sosial dan persatuan nasional. Pasar bebas mendukung sistem ekonomi yang eksploitatif, non-partisipatif dan non-emansipatif, tunduk pada yang rentan.

Para strukturalis tidak hanya menolak pasar bebas, mereka juga menolak konsep populer Adam Smith tentang tangan tak terlihat. Kaum strukturalis percaya bahwa prinsip kepentingan pribadi yang dikombinasikan dengan perilaku manusia sebagai homo oeconomicus justru memotivasi manusia untuk bertindak dalam bentuk homo homini lupus. Asumsi neoklasik Adam Smith tentang "tangan tak terlihat- *the invisible hand*" mengarah ke

"tangan tidak sempurna- *imperfect hand*", bahkan "tangan kotor - *the dirty hand*".

Setelah munculnya pemikiran strukturalis, interpretasi sejarah terhadap masalah dan hambatan di negara-negara berkembang juga memiliki pengaruh yang kuat. Beberapa asumsi strukturalis tentang perekonomian negara-negara berkembang adalah, pertama, bahwa struktur perdagangan luar negeri negara-negara Amerika Latin belum banyak berkembang karena mereka lebih berperan sebagai pengekspor barang-barang kebutuhan pokok berupa bahan mentah ke negara-negara industri.

Kedua, stagnasi sektor pertanian karena struktur pemilikan, pemilikan tanah dan perilaku tidak ekonomis dari oligarki pemilik tanah yang menguasai tanah. Mereka memilih tanah untuk prestise sosial, berusaha melindungi diri dari bahaya inflasi, dan mempraktikkan pertanian skala besar (*latifundo*) dengan teknologi regresif. Ketiga, distribusi pendapatan yang tidak merata serta pemusatan kekayaan dan kekuatan politik di kalangan elite menghambat mobilitas sosial. Hal ini mendorong model konsumsi berlebihan hanya di kalangan sebagian pihak.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa kaum strukturalis berpendapat bahwa ekonomi pasar bebas dunia berdampak negatif terhadap sosial ekonomi masyarakat dunia, seperti:

- a) menyebabkan lebih banyak keterbelakangan dan kemiskinan daripada kekayaan,
- b) meningkatkan tingkat pengangguran bukannya menciptakan lapangan kerja,

- c) menciptakan ketimpangan, bukan kesetaraan.

Pemikiran strukturalis berusaha mengoreksi dan menolak asumsi dasar ekonomi pasar dan menyoroti berbagai kelemahan ekonomi neoklasik yang dipandang parsial. Beberapa kelemahan neoklasikisme perseptual strukturalisme, yaitu:

- a) Kegagalan pasar dan ketidaksempurnaan pasar dalam meningkatkan kerugian mikro-makro. Oleh karena itu, ekonomi neoklasik yang menitikberatkan pada mekanisme persaingan pasar bebas tidak dapat mengatasi ketimpangan struktural.
- b) Keterbelakangan negara-negara berkembang, termasuk negara-negara Amerika Latin. Pasalnya, mereka kebetulan diasosiasikan dengan sistem ekonomi dunia kapitalis dan liberal, meski kondisi ini menempatkan mereka di pinggiran negara kapitalis.

Bagi kaum strukturalis, liberalisme menyebabkan terbentuknya dua jenis negara, yaitu negara pusat dan negara pinggiran. Ini terjadi di negara maju dan berkembang. Kelompok negara maju, negara pusat, menikmati kemakmuran, sedangkan kelompok negara pinggiran, atau negara berkembang, mengalami keterbelakangan dan ketergantungan.

Kondisi ini mungkin karena industrialisasi yang tidak merata. Negara pusat menghasilkan produk industri sedangkan negara pinggiran menghasilkan produk pertanian. Kemudian

keduanya mengeksekusi perdagangan yang seharusnya bisa menghasilkan keuntungan. Namun dalam praktiknya, keuntungan tersebut tampaknya tidak seimbang atau tidak adil. Orang asing mengekspor produk pertanian ke Central Plateau. Dengan ekspor ini, pendapatan masyarakat di negara-negara pinggiran akan meningkat.

Akan tetapi, peningkatan pendapatan itu dibarengi dengan kebutuhan akan berbagai barang mewah yang merupakan hasil produksi negara-negara industri. Beginilah cara barang mewah diimpor dari negara industri ke negara pinggiran. Artinya, pendapatan negara-negara industri juga akan meningkat karena adanya permintaan dari negara-negara pinggiran tersebut.

Hanya nilai tukar barang mewah dan produk pertanian yang tidak seimbang. Hal ini berdampak pada neraca perdagangan yang juga tidak seimbang sehingga menyebabkan defisit di negara-negara perifer. Pada saat yang sama, negara-negara industri juga melindungi produk-produk pertanian yang diproduksi di negaranya. Hal ini menyebabkan terbatasnya ekspor yang dapat diekspor oleh negara-negara pinggiran ke negara-negara pusat.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang dikembangkan oleh negara-negara pusat, semakin banyak sintesis bahan baku industri, yang mengurangi impor bahan baku dari negara-negara pinggiran. Memang semakin sulit untuk mengembangkan perekonomian negara-negara yang jauh.

Dalam situasi ini, ketergantungan pada negara-negara pinggiran muncul. Negara asing bertindak sebagai koloni para kapitalis yang bertindak sebagai pemasok bahan mentah untuk kebutuhan industri. Pada akhirnya negeri-negeri pinggiran itu hanya akan menjadi pemasok bahan baku murah dan pembeli produksi industri negeri-negeri kapitalis. Kondisi ini menciptakan struktur ketergantungan yang menghambat pembangunan di negara-negara yang jauh. Konsep ini memunculkan ungkapan "pusat negara - negara center" atau "Mittelland" dan "negara luar - negara periferi" atau pinggiran.

2. Perspektif Dependensia

Pendekatan dependensia atau ketergantungan merupakan pengembangan lebih lanjut dari strukturalisme, yang menekankan masalah keterbelakangan di negara-negara Dunia Ketiga dari perspektif kebijakan struktural politik ekonomi global, khususnya di negara-negara bekas jajahan. Jadi, teori ketergantungan atau dependency theory mengkaji masalah pembangunan dari sudut pandang negara dunia ketiga.

Menurut Theotonio Dos Santos, ketergantungan (*dependence*) adalah suatu keadaan dimana kehidupan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh perkembangan dan perluasan kehidupan ekonomi negara lain, dengan negara tertentu hanya sebagai penerima akibat. Aspek penting dalam kajian sosiologi menyajikan keberadaan masyarakat dan model ketergantungan

lain dalam kehidupan suatu bangsa di dunia. Teori ketergantungan lebih berfokus pada keterbelakangan dan pembangunan negara-negara yang jauh. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa teori ketergantungan mewakili “suara negara-negara perifer” untuk menantang hegemoni ekonomi, politik, budaya, dan intelektual negara-negara maju.

Pendekatan ketergantungan juga menolak teori modernisasi, yang “menuduh” bahwa penurunan pembangunan dunia ketiga lebih mungkin disebabkan oleh faktor internal di negara-negara dunia ketiga yang miskin. Kerabat percaya bahwa faktor eksternal menghambat perkembangan negara berkembang dan terbelakang.

Namun, teori ketergantungan juga dikritik karena mengabaikan keberhasilan pertumbuhan ekonomi di banyak negara Dunia Ketiga. Misalnya, *New Industrializing Countries* (NICs) atau *emerging market economy*, seperti Taiwan, Korea Selatan, Singapura, dan Hong Kong berhasil keluar dari ketergantungan dengan memanfaatkan faktor internal mereka. Namun, peran penting masih dikaitkan dengan teori ketergantungan karena keberadaannya mampu menggambarkan kondisi di banyak negara dan memberikan ide untuk teori pembangunan.

Teori ketergantungan juga didasarkan pada warisan pemikiran Raul Prebisch. Prebisch mengkritik pembagian kerja internasional yang sudah ketinggalan zaman, yaitu *International Division of Labour* (IDL)- pembagian kerja internasional. Menurut Prebisch, IDL adalah penyebab utama masalah pembangunan di

Amerika Latin. Adanya teori International Division of Labour (IDL) yang didasarkan pada teori keunggulan komparatif menyebabkan negara-negara di dunia melakukan spesialisasi dalam produksinya. Oleh karena itu, negara-negara di dunia terbagi menjadi dua kelompok, yaitu negara pusat/inti yang menghasilkan produk industri dan negara pinggiran/terpencil yang menghasilkan produk pertanian. Keduanya berdagang satu sama lain, dan menurut teori ini, mereka seharusnya menunjukkan kebalikannya. Negara-negara pusat yang berspesialisasi dalam industri semakin kaya, sementara negara-negara pinggiran semakin miskin. Padahal seharusnya kedua negara sama-sama kaya karena perdagangan menguntungkan keduanya

3. Strukturalisme vs Dependensia

Strukturalisme mendapatkan banyak kritikan terkait pemikirannya. Kritik terhadap strukturalisme menyatakan bahwa perspektif ini menjadi pembenaran bagi negara-negara miskin yang memiliki sedikit kesempatan untuk memperbaiki posisi mereka dan tampaknya meremehkan perjuangan mereka melawan tekanan dunia (tekanan kapitalisme global). Dalam hal ini, strukturalisme mampu menggambarkan kejahatan kapitalisme internasional, tetapi tidak ada cara untuk mengubah tatanan ini.

Strukturalisme juga dianggap terlalu berlebihan dalam menggolongkan kelas. Semuanya dijelaskan berdasarkan kelas

sosial, kecuali berbagai fenomena (perang, krisis ekonomi, ketimpangan dan aspek identitas, jenis kelamin, etnis dan identitas lainnya). Padahal, tidak semua hal berlangsung berdasarkan kelas, dan tidak setiap kelas selalu berimbas negatif. Selain itu, banyak yang mengkritik pernyataan strukturalisme yang secara implisit mengklaim bahwa akhir sejarah adalah sosialisme (menurut Materialisme Historis Karl Marx), yang sangat jauh dari kenyataan karena tidak melihat dinamika perubahan sejarah dan sosial.

Teori dependensia juga tidak lepas dari kritik. Kritikus terhadap dependency theory berpendapat bahwa, menurut metodologi penelitian, teori ketergantungan bukanlah sebuah karya ilmiah, tetapi sebuah pamflet politik. Teori modernisasi menyatakan bahwa teori ketergantungan memberikan penjelasan ilmiah dan analisis masalah di negara-negara dunia ketiga.

Sebagai kategori teoretis, teori ketergantungan terlalu menekankan pentingnya pengaruh faktor eksternal, hampir melupakan dinamika internal seperti peran sosial dan pemerintahan. Analisis perebutan kekuasaan politik juga tidak ditemukan dalam kategori teoretis. Karena teori ketergantungan menganggap bahwa kaum industrialis negara-negara Dunia Ketiga hanyalah kaum borjuis kecil yang bergantung pada modal asing. Di sisi lain, teori ketergantungan melihat pemerintah sebagai komite manajemen modal asing dan negara-negara imperialis.

Implikasi politik teori ketergantungan berpendapat bahwa ketergantungan dan keterbelakangan negara-negara Dunia Ketiga akan tetap tidak terselesaikan selama hubungan perdagangan yang tidak setara ini menjadi dasar hubungan internasional. Dalam hal ini, genap berada di posisi yang berlawanan. Mereka berargumen bahwa ketergantungan dan perkembangan dapat dicapai bersama-sama, dan terlebih lagi ketergantungan tidak harus mengarah pada keterbelakangan. Kritikus juga merasa bahwa formulasi politik yang diajukan oleh teori ketergantungan gagal menjelaskan secara rinci dan jelas bagaimana negara dunia ketiga berfungsi.

C. Rangkuman

Teori strukturalisme dan teori dependensia pada dasarnya menganggap ketimpangan antara negara berkembang dan negara maju sebagai akibat dari industrialisasi yang tidak merata, yang menyebabkan negara berkembang (negara perifer) menjadi tergantung pada negara maju (negara tengah). Jika negara terbelakang ingin maju, ia harus dapat melakukan industrialisasi. Langkah industrialisasi dapat dimulai dengan membangun industri barang substitusi impor. Negara harus ikut serta dalam pembangunan ini dengan mendukung industri yang sedang berkembang sehingga dapat meningkatkan daya saingnya.

Meski demikian, masih ada kritik yang muncul terhadap strukturalisme dan dependensia, terutama terkait bagaimana implementasi teori ini dapat mengatasi masalah-masalah ekonomi

politik di negara periferal. Kedua teori ini dianggap berlebihan dalam mengkritik kapitalisme serta kelas-kelas yang ditimbulkan akibat kapitalisme, tetapi tidak mampu secara rinci bagaimana cara dunia ketiga bekerja. Bahkan, bukti bahwa ada negara-negara periferal seperti *New Industrializing Country* yang akhirnya mampu lepas dari negara center, juga menjadi contoh nyata kelemahan pemikiran strukturalisme dependensia.

D. Pendalaman Materi

1. Bagaimana sejarah kemunculan teori strukturalisme dependensia?
2. Bagaimana pemikiran strukturalisme menjelaskan relasi negara denter dan negara pinggiran?
3. Bagaimana pemikiran dependensia menjelaskan munculnya ketergantungan dari negara pinggiran terhadap negara pusat?
4. Apa kritik yang ditujukan terhadap teori strukturalisme dependensia?

Bab 5

-

International Trade dan Multi-Nationals Company

A. Indikator Pembelajaran

Mampu memerinci Teori International Trade dan Multi-Nationals Company dalam Ekonomi Politik Internasional

1. Ketepatan memerinci pengertian karakteristik, maupun instrumen teori International Trade dalam Ekonomi Politik Internasional
2. Ketepatan memerinci imbas ekonomi politik International Trade terhadap hubungan internasional
3. Ketepatan memerinci pengertian karakteristik, maupun instrumen Multi-Nationals Company dalam Ekonomi Politik Internasional
4. Ketepatan memerinci peran Multi-Nationals Company dalam ekonomi dan politik

B. Materi Pembelajaran

1. *International Trade*

Era globalisasi sering digambarkan dengan semakin maraknya perdagangan bebas atau perdagangan internasional. Berbeda dengan perdagangan dalam negeri, konsep perdagangan internasional ini tentunya memiliki cakupan yang lebih luas dan kompleks. Pertumbuhan perdagangan internasional juga didorong oleh kondisi dunia yang semakin hari semakin memburuk. Hal ini dapat terjadi karena transportasi dan komunikasi yang lebih cepat dan mudah. Akibatnya, pasar internasional semakin terbuka, yang memudahkan untuk membeli dan menjual barang, jasa, dan aset keuangan antar entitas ekonomi di negara lain.

Jika kita mengacu pada dunia sejarah, perdagangan internasional bukanlah hal yang baru secara fundamental. Karena bahkan pada zaman dahulu, perdagangan internasional ini sering dilakukan dan juga merupakan bagian penting dari perekonomian. Pada zaman kuno, perdagangan internasional terutama dilakukan oleh orang Mesir, Yunani, Romawi, dan Fenisia, kemudian oleh orang Spanyol, Portugal, Belanda, dan Inggris.

Pengertian perdagangan internasional merujuk pada bentuk transaksi dagang yang dilakukan antara subyek ekonomi negara yang satu dengan subyek ekonomi negara yang lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa. Subyek ekonomi yang

dimaksud dalam hal ini dapat berupa penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri, perusahaan negara ataupun departemen pemerintah.

Perdagangan internasional memunculkan banyak konsep atau instrumen yang merupakan bentuk kebijakan yang muncul akibat aktivitas perdagangan internasional. Instrumen ini seperti adanya kebijakan tarif, subsidi ekspor, pembatasan impor, pengekangan ekspor, persyaratan kandungan lokal, pengendalian pemerintah, serta berbagai barriers atau hambatan yang dapat muncul dalam aktivitas perdagangan internasional. Hambatan ini meliputi hambatan tarif - *tarriief barriers*, hambatan non tarif - *non tarrif barriers*, dan hambatan birokrasi - *red tape barriers*.

2. Imbas *International Trade* terhadap Hubungan Internasional

Hubungan internasional dan perdagangan internasional memiliki korelasi yang sangat berdekatan karena keduanya memiliki skema aktivitas yang serupa, berupa relasi lintas negara. Apalagi, di era globalisasi yang semakin intens, hubungan internasional membuka potensi atau peluang besar dalam bidang ekonomi atau perdagangan.

Perdagangan internasional pun banyak berimbas pada aktivitas hubungan internasional. Aktivitas perdagangan internasional memunculkan banyak ketergantungan akibat

kelebihan dan keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing negara. Suatu negara dapat menawarkan banyak hal kepada negara lain dan begitu juga sebaliknya. Namun, pada imbasnya, hal ini menghasilkan istilah yang disebut *economic interdependence*.

Negara satu sama lain semakin terikat dalam aktivitas perdagangan internasional. Alhasil, keterikatan inilah yang memungkinkan mempengaruhi perdagangan internasional di berbagai bidang. Ini termasuk hubungan sosial-politik di pasar nasional dan internasional dan keterbukaan terhadap ragam industri lainnya. Aktivitas industri dalam produksi dalam negeri, pengolahan, pariwisata, ketenagakerjaan, hingga aktivitas investasi juga dapat berubah menyesuaikan kegiatan perdagangan internasional yang dilakukan oleh suatu negara.

Tidak hanya itu, dengan globalisasi ekonomi, hubungan multinasional telah menjadi sistem organik ekonomi dunia. Akibatnya, hubungan antar negara berkembang menjadi sistem yang semakin menyatu atau terintegrasi satu sama lain. Perkembangan bisnis yang terus berkembang ini juga telah menciptakan lapangan kerja baru bagi para operatornya. Sebab, perdagangan internasional muncul dari keuntungan dan keterbatasan antar negara, sehingga pada akhirnya meningkatkan saling ketergantungan ekonomi atau integrasi ekonomi.

Integrasi ekonomi yang semakin kuat mengisyaratkan adanya kebutuhan kerjasama internasional yang juga semakin kuat. Artinya, aktivitas hubungan internasional akan semakin banyak dijalankan dalam skema ini, atau dalam agenda ekonomi

serta perdagangan internasional. Kondisi ini nyata terlihat ketika banyak aktivitas hubungan internasional kini mulai menekankan pada perbincangan *soft power* yang ada di ranah ekonomi atau perdagangan, dan sedikit membahas pada aktivitas *hard power* pada masalah-masalah militer atau keamanan konvensional.

3. Multi-Nationals Company

Definisi Sederhana MNC adalah perusahaan yang beroperasi di dua negara atau lebih. Dengan kata lain, pimpinan perusahaan multinasional ini mungkin berlokasi di satu negara sedangkan anak perusahaannya mungkin berlokasi di negara lain di seluruh dunia. Perlu ditekankan bahwa grup MNE harus memiliki perusahaan/anak perusahaan yang beroperasi di negara lain. Jadi bukan hanya perusahaan yang menjual barangnya ke negara lain. Jika suatu cabang tidak melakukan bisnis di negara lain, perusahaan tersebut tidak dapat disebut sebagai perusahaan multinasional. Di Indonesia, MNC atau perusahaan multinasional sering disebut sebagai Perusahaan Multi Nasional (PMN). Ditafsir secara sepintas, pengertian PMN memang mudah dipahami dan diidentikkan dengan pengertian MNC. Namun perlu dicatat bahwa pentingnya PMN sebenarnya para ahli masih belum mampu mendefinisikan konsep PMN secara konvensional.

PMN sendiri terkadang rancu dan juga diidentikkan dengan TNC atau Transnational Corporation (TNC). Banyak orang beranggapan bahwa PMN, MNC dan TNC memiliki arti

yang sama. Namun, banyak ekonom membedakan antara arti MNC dan TNC. MNC didefinisikan sebagai perusahaan yang beroperasi di luar negaranya sendiri dan sahamnya didistribusikan di lebih dari satu negara. Berbeda dengan TNC yang bisa ditangkap lebih jauh. Definisi TNC lebih dari sekedar perusahaan yang beroperasi di dua negara atau lebih, tetapi operasi TNC dianggap lebih kompleks karena TNC memiliki kendali yang luas untuk menjangkau bisnis dan industri global yang luas.

Terlepas dari perdebatan para ahli mengenai perbedaan pengertian PMN, MNC dan TNC, dapat dikatakan bahwa ketiga konsep tersebut secara umum memiliki perbedaan yang sama dalam hal kegiatan yang dilakukan di lebih dari dua negara, sehingga dapat dianggap sebagai pelaku dalam hubungan Internasional. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan menggeneralisasikan ketiga konsep tersebut pada MNC. Namun, istilah MNC, TNC, dan PMN digunakan secara bergantian.

Sebuah perusahaan secara alami menjadi multinasional karena memiliki tujuan tertentu. Secara umum tentunya tujuan utamanya adalah agar keuntungan yang lebih besar dapat dicapai dengan cara mendirikan produksi dan operasi di luar negeri. Karena semakin luas operasi dan pasarnya, semakin besar potensi keuntungannya.

Secara lebih spesifik, tujuan dari MNC dapat dijabarkan dalam poin-poin berikut:

- a) *Raw material seeker*, Pencari komoditas menerima bahan baku untuk diproses/diproduksi di negara lain.

- b) *Market seeker*, Pencari pasar, mendapatkan pangsa pasar baru di negara lain.
- c) *Cost minimizers seeker*, Peminimal biaya Seeker mencapai efisiensi biaya karena investasi memungkinkan biaya produksi yang lebih rendah.
- d) *Risk minimizers seeker*, Pencari Pengurang Risiko dapat membantu perusahaan mengurangi risiko produksi dan distribusi dengan menjelajahi lokasi baru di negara lain.
- e) *Profit minimizers seeker*, Maksimalisasi keuntungan menggantikan minimisasi biaya, perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan dengan cara menekan biaya produksi semaksimal mungkin. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menghindari biaya yang biasanya terkait dengan perantara pihak ketiga.
- f) *Fund seeker*, Pencari modal, dalam pembiayaan manajerial, suatu perusahaan dapat memperoleh pembiayaan dengan meminjam dari bank jika memiliki catatan positif dalam penggunaan dana tersebut secara maksimal untuk mencapai pengembalian yang sebaik mungkin.

Penguatan struktur perusahaan, Dengan memperkuat struktur perusahaan, melayani pasar luar negeri, perusahaan dapat memperkuat struktur perusahaannya. Perusahaan juga dapat menjadi entitas yang kuat dengan menggunakan pengetahuan bisnis mereka di negara lain.

4. Peran *Multi-Nationals Company* dalam Ekonomi dan Politik

Globalisasi membawa tatanan kerja sama ekonomi yang lebih kompleks. Di masa lalu, banyak pemain dalam hubungan ekonomi internasional berada di negara, namun hal ini tampaknya tidak lagi terjadi. Perusahaan-perusahaan baru berskala internasional, yang saat ini memainkan peran penting dalam hubungan internasional.

Bahkan dapat dikatakan bahwa perusahaan berskala internasional yang sering disebut perusahaan multinasional atau multinational company (MNC) merupakan pelaku utama dalam perdagangan internasional. Mereka adalah pemain utama dalam ekspor, impor, transaksi internasional, dan model operasi internasional lainnya seperti usaha patungan, investasi asing, dan skema perizinan. Meningkatnya pengaruh MNC terhadap pola hubungan internasional ini membuat kajian tentang MNC menjadi penting.

Peranan MNC terletak pada aktivitasnya yang semakin intens di suatu negara. Pada umumnya perusahaan multinasional terkonsentrasi di negara maju dan kantornya tersebar di negara berkembang. Hal ini sering mengakibatkan interaksi antara MNC dan negara seringkali tidak seimbang. Namun, keberadaan perusahaan multinasional di suatu negara dapat mempengaruhi proses perkembangannya secara signifikan, terutama di negara-negara berkembang. Karena kekuatan perusahaan multinasional

bisa sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Kekuatan dan pengaruh perusahaan multinasional di suatu negara dapat dilihat pada negara berkembang yang dapat bergantung pada perusahaan multinasional. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh keunggulan teknologi dan modal yang dimiliki MNC dibandingkan negara. Dengan keunggulan teknologi dan modalnya, MNC dapat mempengaruhi kondisi ekonomi negara, seperti tawaran pekerjaan, akses pasar, transfer teknologi dan sejenisnya.

Dalam arti tertentu, perusahaan multinasional dapat menginvasi berbagai sendi dan kegiatan ekonomi negara. Semakin luas dan komprehensif aktivitas MNC di suatu negara, semakin besar pengaruhnya terhadap kebijakan dan peraturan tingkat nasional. Padahal, ketika sebuah MNC mampu mempengaruhi kebijakan dan regulasi di tingkat internasional, bukan tidak mungkin. Dampak operasi perusahaan multinasional ini telah mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan masyarakat di negara-negara berkembang. Hal ini dikarenakan adanya PMN yang begitu komprehensif, dan pendanaannya yang sangat besar, yang umumnya dilakukan oleh MNC. Kantor, pabrik, dan cabang yang mereka bangun berlokasi di banyak negara dan tersebar luas.

Mereka juga dapat mempekerjakan sejumlah besar pekerja di negara tersebut. Anda berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam memajukan perekonomian negara. Kerugian

ekonomi juga dapat terjadi bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi. MNC yang besar memiliki aset yang tersebar di banyak negara. Cakupan MNC yang luas dan modal yang kuat memungkinkan MNC untuk memberikan pengaruh yang kuat pada politik global. Karena pengaruh finansial mereka terhadap politisi di berbagai negara juga sangat tinggi. Sumber keuangan mereka cukup untuk membangun hubungan dengan masyarakat dan terlibat dalam advokasi politik.

MNC memiliki jangkauan internasional dan mobilitas yang luas baik di dalam maupun di luar negara tempat mereka berinvestasi. Oleh karena itu, negara-negara, khususnya negara berkembang, seringkali berlomba-lomba untuk mendapatkan investasi yang diberikan oleh MNC tersebut untuk menempatkan fasilitasnya di negaranya.

Dengan adanya kehadiran MNC dengan investasinya di dalam negeri, maka negara dapat menghasilkan lebih banyak penerimaan pajak, memberikan lebih banyak kesempatan kerja bagi rakyatnya, dan meraih berbagai manfaat ekonomi lainnya. Karena negara memandang perlu kehadiran MNC, maka dilakukan beberapa langkah seperti: memberikan insentif kepada MNC yang bersedia datang ke wilayahnya.

Selain negara, distrik politik daerah sering memberikan insentif dalam bentuk pengurangan pajak, bantuan pemerintah, infrastruktur, standar tenaga kerja, dan lingkungan yang mendukung perkembangan perusahaan tersebut. Pada dasarnya,

beberapa negara berusaha memikat MNC dengan layanan khusus hanya agar MNC siap beroperasi di wilayahnya.

Apa yang dilakukan MNC di negara tuan rumah bisa menjadi kerja sama yang saling menguntungkan. MNC dapat mengembangkan usahanya, negara sasaran dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di wilayahnya. Namun, tidak semua sepakat bahwa aktivitas global MNC bisa selalu mendapat respon positif. Terutama di negara Dunia Ketiga, MNC sering dinilai menimbulkan konflik dan menempatkan negara dalam dilema. Sifat modal yang diberikan MNC dalam bentuk penanaman modal asing yang ekspansif terhadap lahan lokal seringkali dipandang merugikan. Karena merasa berpengaruh, MNC memiliki *power* yang cukup kuat untuk melakukan *bargaining* dengan negara. Seringkali MNC justru berada pada posisi negosiasi yang tinggi. Oleh karena itu, ketika hal ini terjadi, MNC juga mampu mempengaruhi model politik negara/daerah sesuai kepentingannya.

Daerah yang percaya bahwa manfaat ekonomi dan sosial dari MNC dapat terwujud sepenuhnya seringkali mengiyakan semua permintaan MNC tanpa memikirkan *self-determination*. Kerugian pasca-efek dan ketergantungan negara terhadap PMN sering diabaikan. Masalah ini sering dihadapi oleh negara berkembang tuan rumah PMN.

Meski relasi yang dibangun seringkali tidak seimbang, konflik ini tidak sepenuhnya terwujud karena sifat MNC yang ekspansionis sebagai entitas bisnis. Tentu tak dapat dipungkiri

bahwa MNC memiliki sifat dasar untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi yang diperoleh, sehingga memungkinkan terjadinya perselisihan paham pada masalah sosial, lingkungan dan lainnya. Masalah seperti itu seringkali muncul dari masalah yang ada di ibukota tuan rumah itu sendiri. Bahkan dalam posisi tawar yang ekuilibrium, penerima modal tidak dapat menempatkan dirinya pada posisi tawar yang jauh lebih tinggi daripada MNC.

Oleh karena itu, negara penerima modal hanya menerapkan kebijakan sesuai kebutuhan investor. Selain itu, negara tidak cukup mampu melanjutkan operasional MNC yang secara empiris memiliki peluang transaksi yang jauh lebih baik dibandingkan negara penerima modal. Bahkan, hal ini juga mengakibatkan lemahnya ikatan ekonomi yang dibangun oleh pengusaha lokal. Misalnya, dengan segala kekuatan komersial MNC, semakin mudah mendapatkan sumber permodalan dari perbankan negara. Bank di negara berkembang lebih memilih untuk menyediakan kredit dan pengaturan keuangan atau bank garansi untuk MNC besar dan bonafid dengan operasi yang luas daripada untuk pengembangan bisnis lokal.

Bahkan, MNC dengan aset internasional dapat lebih mudah mengakses pembiayaan untuk mengembangkan usahanya. Di sisi lain, usaha lokal yang berjuang untuk berkembang seringkali menghadapi kesulitan pembiayaan dan segala bentuknya. Ini juga berlaku untuk birokrasi dan perizinan, di mana MNC dan bisnis lokal seringkali diperlakukan berbeda.

Usaha kecil lokal seringkali berkuat dengan perizinan dan birokrasi, bahkan peraturan atau kebijakan daerah seringkali menghambat perkembangan usaha mereka. Pada saat yang sama, dengan kekuatannya, MNC bahkan dapat mempengaruhi politik itu sendiri. Namun, tentu dinamika ini adalah hal yang sifatnya bervariasi implementasinya di tiap negara. Seberapa kuat pengaruh MNC, masih tergantung pada seberapa kuat negara dalam merancang kebijakannya bagi kehadiran MNC.

C. Rangkuman

Perdagangan internasional dan kehadiran MNC secara global datang menghadirkan integrasi ekonomi atau pun interdependensi ekonomi yang semakin kuat. Satu negara dengan negara lain menjadi saling membutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan serta mencapai kepentingan nasionalnya. Hal ini berimbas pada aktivitas hubungan internasional yang semakin banyak diwarnai dengan pembahasan permasalahan ekonomi, baik dalam bentuk kerjasama maupun penyelesaian sengketa yang muncul akibat aktivitas perdagangan internasional atau MNC.

Relasi MNC sebagai entitas bisnis sekaligus aktor hubungan internasional *non state*, semakin banyak berhubungan dengan negara dan melakukan tawar menawar. Relasinya dengan negara-negara penerima modal, terutama negara berkembang memang pun sering dianggap berada pada posisi yang tidak seimbang. Bagaimana pun juga, tujuan utama MNC adalah

mengembangkan perusahaannya sebesar mungkin demi profit setinggi mungkin. MNC memiliki kekuatan untuk mengawasi sumber-sumber yang menguntungkan baginya secara luas di seluruh dunia. Akibatnya, MNC akan selalu berusaha mencapai *global factory*, *global money market*, *global shopping centre* yang sering kali mempengaruhi kebijakan suatu negara dengan posisi tawar yang lebih rendah. Semakin luas dan mengglobal suatu MNC, semakin besar kekuatannya, serta semakin mampu pula MNC tersebut dalam mempengaruhi kebijakan nasional hingga internasional demi mengakomodasi kepentingannya.

D. Pendalaman Materi

1. Jelaskan bagaimana imbas kegiatan perdagangan internasional terhadap aktivitas hubungan internasional!
2. Jelaskan bagaimana MNC dapat memiliki *power* dalam mempengaruhi kebijakan di suatu negara?

Bab 6

-

International Finance dan International Monetary System

A. Indikator Pembelajaran

Mampu merekonstruksi konsep International Finance dan International Monetary System

1. Ketepatan merekonstruksi konsep International Finance dan realisasinya dalam kebijakan
2. Ketepatan merekonstruksi konsep International Monetary System dan realisasinya dalam kebijakan

B. Materi Pembelajaran

1. Kemunculan International Finance dan International Monetary System

Perekonomian dunia terkait erat dengan sistem keuangan, yang meliputi sistem keuangan dan moneter, atau yang dikenal sebagai *international finance* dan *international monetary system*. Sistem moneter internasional dapat diartikan sebagai perjanjian formal atau kesepakatan antar negara tentang nilai tukar setiap mata uang dunia relatif terhadap mata uang lainnya. Sederhananya, sistem moneter ini adalah tentang nilai mata uang dan hubungannya. Dalam sistem moneter internasional, terdapat aturan tentang cara pembayaran yang dapat diterima baik antara pembeli (konsumen) dan penjual (produsen) dalam batas yang berbeda. Namun, ketentuan ini harus disepakati antara anggotanya atau antara negara dan bank sentralnya.

Negara-negara harus dapat, melalui bank sentralnya, mengalokasikan modal atau cadangan likuiditas sesuai aturan yang disepakati, sehingga cukup untuk menghadapi fluktuasi dalam perdagangan internasional. Dengan demikian, neraca perdagangan internasional untuk neraca keuangan global dapat tercapai, terutama untuk nilai masing-masing entitas ekonomi, yang sewaktu-waktu dapat disesuaikan dengan nilai sebenarnya.

Sejarah sistem moneter internasional ini dimulai pada tahun 1870-an ketika hegemoni Inggris menyebar dalam

perekonomian dunia. Selama abad ini Inggris mendominasi sektor manufaktur atau industri dan menjadi produsen terbesar kira-kira setengah dari cadangan besi dan batubara dunia. Nyatanya, Inggris sendiri mengkonsumsi kurang dari setengah dari total produksi ini. Pada saat yang sama, Inggris Raya juga memiliki kekuatan ekonomi yang kuat. Ini tercermin dari jumlah cadangan emas global yang mereka miliki antara tahun 1870 dan 1913, yang merupakan yang terbesar di dunia.

Inggris juga mampu membiayai sekitar 60 persen pinjaman jangka pendek dari semua transaksi perdagangan global. Kekuatan keuangan Inggris kemudian membuat Inggris berinisiatif membentuk sistem keuangan standar emas. Sistem keuangan standar emas ini dimulai pada tahun 1875. Sistem ini kemudian diikuti oleh banyak negara lain di dunia, terutama negara-negara Eropa. Sejarah pasar mata uang dunia dan sistem moneter internasional dimulai dengan dinamika ini. Dalam sistem pasar mata uang ini, pemerintah masing-masing negara menjamin penukaran mata uang sejumlah emas tertentu (berat tetap) dan sebaliknya (convertible). Sederhananya, uang yang beredar didukung oleh emas.

Untuk mengakomodasi sistem ini, semua ekonomi besar memiliki mata uang mereka dalam ons emas pada akhir abad ke-19. Nilai tukar antara kedua mata uang ini didasarkan pada perbedaan nilai satu ons emas antara kedua mata uang tersebut. Ini adalah alat standarisasi mata uang pertama dalam sejarah dunia. Jaringan keuangan antar negara yang sangat luas inilah

yang oleh para ahli disebut sebagai sistem keuangan internasional atau international moneter system (IMS). Pada saat itu, mata uang regional seperti Persatuan Moneter Latin (Belgia, Italia, Swiss, dan Prancis) dan Persatuan Moneter Skandinavia (Denmark, Norwegia, Swedia, dan lainnya) juga disatukan.

Sejarah perkembangan sistem moneter internasional secara umum dapat dibagi menjadi tiga periode, yaitu periode sebelum perang, periode perang dunia, dan periode pasca perang. Periodisasi ini dilakukan berdasarkan perbedaan karakteristik sistem moneter internasional yang digunakan sesuai dengan kondisi politik dan ekonomi dunia pada ketiga periode tersebut.

2. Kebijakan Keuangan Internasional

Dalam kebijakan keuangan internasional, lekat kaitannya dengan *international monetary fund*, yang menjadi kekuatan pembiayaan atau penataan keuangan global. Pembahasan ini dimulai sejak sejarah penataan keuangan global dengan menggunakan standar emas. Penggunaan standar emas dalam sistem keuangan dan komersial internasional berlangsung cukup lama, termasuk pada masa perang dunia. Namun, Perang Dunia Kedua memengaruhi sistem moneter internasional ini dan jatuh ke dalam kekacauan hingga akhirnya ditinggalkan. Selain itu, masih banyak persoalan lain yang terkait dengan pasokan dan permintaan emas serta penentuan standar emas yang ditetapkan masing-masing negara.

Akhirnya, pada akhir perang dunia kedua, sekutu, yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Inggris Raya, mengambil inisiatif untuk memperbaiki sistem keuangan global, yang telah dikacaukan oleh pengabaian standar emas. Untuk membangun sistem moneter internasional yang lebih kuat dan mendukung liberalisasi ekonomi global, Konferensi Bretton Woods diadakan pada bulan Juli 1944 di Bretton Woods, Hampshire, AS, dihadiri oleh lebih dari 700 delegasi dari 45 negara. Sistem. Konferensi ini memiliki dua agenda utama, yaitu:

- a) mempromosikan pengurangan tarif dan hambatan perdagangan internasional,
- b) Penciptaan kerangka kerja ekonomi global untuk meminimalkan konflik ekonomi dan mencegah terulangnya perang dunia.

Kasus ini menandai dimulainya sistem Bretton Woods, yang membatasi kerja sama sementara di dua bidang utama, yaitu sistem pembayaran internasional dan nilai alat pembayaran internasional. Singkatnya, sistem Bretton Woods memiliki tiga poin utama, antara lain:

- a) Metode tarif tetap
- b) Dolar AS atau dolar AS menggantikan standar emas dan menjadi mata uang cadangan utama
- c) Terbentuknya tiga badan internasional untuk mengendalikan kegiatan ekonomi global secara keseluruhan, yaitu International Monetary Fund (IMF),

International Bank for Reconstruction and Development (sekarang Bank Dunia) dan General Agreement on Tariffs and Trade/GATT (sekarang the General Agreement on Tariffs and Trade/GATT). Organisasi Dunia tentang Perdagangan/WTO).

Lalu ada rezim Bretton Woods yang diwakili oleh tiga institusi. Namun, IMF adalah lembaga yang keluar dari rezim Bretton Woods yang paling besar pengaruhnya terhadap sistem moneter modern, bersama dengan International Bank for Reconstruction and Development/BIRD (sekarang Bank Dunia) yang bertugas menyediakan modal untuk rekonstruksi. . Pengadilan Negara Berperang. Peran dominan IMF tercermin dalam enam tujuan fundamentalnya, termasuk:

- a) Promosi kerja sama moneter internasional melalui pendirian suatu lembaga (IMF);
- b) memperluas perdagangan dan investasi dunia;
- c) Mendorong stabilitas nilai tukar;
- d) Mengurangi dan membatasi praktik yang membatasi pembayaran internasional;
- e) Menyediakan dana yang dapat dipinjam dalam bentuk pinjaman jangka pendek atau menengah untuk menjaga stabilitas nilai tukar, asalkan terdapat defisit sementara pada neraca pembayaran sampai dapat diatasi dengan penyesuaian nilai tukar yang tinggi;

- f) Penyempitan dan minimalisasi nilai defisit atau surplus neraca pembayaran.

Pasca runtuhnya sistem Bretton Woods, IMF pun menjadi lembaga internasional yang masih memegang kendali besar atas sistem keuangan internasional hingga saat ini. Sistem nilai tukar atau penilaian mata uang sekarang juga menggunakan sistem yang lebih kompleks atau multilateral.

Nilai mata uang juga ditentukan oleh berbagai indikator, antara lain:

- a) inflasi relatif
- b) Tingkat Pendapatan Relatif
- c) kepentingan relatif
- d) Kontrol negara
- e) Harapan Nilai Masa Depan

Setiap negara memiliki sistem moneter sendiri. Namun, ada standar mata uang internasional yang berlaku untuk negara-negara di kawasan atau bahkan secara global. Sistem moneter internasional adalah kesepakatan antara dua atau lebih negara di kawasan tentang nilai tukar masing-masing mata uang dan hubungan ekonomi antar negara.

Sistem moneter ini mengatur rasio pembayaran transaksi ekonomi antar negara. Sistem ini juga diatur oleh lembaga ekonomi internasional khusus. Oleh karena itu, sistem moneter internasional adalah aturan, pengaturan, dan organisasi yang

memiliki dampak signifikan terhadap sistem transaksi dan pembayaran dalam skala internasional.

C. Rangkuman

Perekonomian dunia terkait erat dengan sistem keuangan, yang meliputi sistem keuangan dan moneter, atau yang dikenal sebagai *international finance* dan *international monetary system*. Sistem moneter internasional dapat diartikan sebagai perjanjian formal atau kesepakatan antar negara tentang nilai tukar setiap mata uang dunia relatif terhadap mata uang lainnya. Setiap negara memiliki sistem moneter sendiri. Namun, ada standar mata uang internasional yang berlaku untuk negara-negara di kawasan atau bahkan secara global.

Sistem moneter internasional berisi kesepakatan antara dua atau lebih negara di kawasan tentang nilai tukar masing-masing mata uang dan hubungan ekonomi antar negara. Sistem moneter mengatur rasio pembayaran transaksi ekonomi antar negara. Sistem ini juga diatur oleh lembaga ekonomi internasional khusus. Oleh karena itu, sistem moneter internasional adalah aturan, pengaturan, dan organisasi yang memiliki dampak signifikan terhadap sistem transaksi dan pembayaran dalam skala internasional.

D. Pendalaman Materi

1. Jelaskan pentingnya sistem moneter internasional dalam mengatur relasi internasional di bidang finansia!
2. Jelaskan dinamika perkembangan dan tarik ulur kepentingan yang ada dalam kebijakan keuangan internasional?

Bab 8

-

Dinamika *Footloose* *Industry*

A. Indikator Pembelajaran

Mampu mengkategorikan konsep dan realisasi Footloose Industry

1. Ketepatan menjelaskan konsep Footloose Industry
2. Ketepatan memberi contoh konsep Footloose Industry
3. Ketepatan mengkategorikan footloose industry sesuai karakteristiknya.

B. Materi Pembelajaran

1. Konsep *Footloose Industry*

Dalam bisnis, adalah wajar untuk mencari keuntungan tertinggi. Keuntungan finansial adalah tren utama bisnis. Pemahaman ini juga menjadi dasar bisnis umum perusahaan. Perusahaan berusaha menggunakan berbagai faktor produksi yang ada sebagai input pada nilai serendah mungkin untuk menghasilkan nilai output yang maksimal. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan beberapa strategi. Salah satu bentuk industri yang dapat dengan mudah menerapkan strategi tersebut adalah *Footloose Industry*. Perusahaan ini dapat lebih fleksibel dalam pengelolaan faktor-faktor produksinya. Lalu mengapa? Mari kita lihat lebih dekat definisi industri yang tidak terikat untuk lebih memahaminya.

Definisi atau definisi *Footloose Industry* adalah jenis usaha yang tidak terikat pada faktor produksi berbasis lokasi tertentu, sehingga usaha ini lebih leluasa untuk berpindah atau menetap di tempat yang dianggap paling menguntungkan dan akomodatif. tujuan yang akan dicapai perusahaan. Karena fleksibilitas ruang, perusahaan industri jenis ini biasanya berusaha mendapatkan area yang paling cocok untuk digunakan sebagai basis produksi. Tujuan utama relokasi industri ini adalah (1) menekan biaya produksi untuk meningkatkan keuntungan dan (2) menciptakan

Global Production Network (GPN) atau jaringan produksi global yang kuat.

2. Kebijakan *Footloose Industry*

Bagi perusahaan multinasional, kebijakan industri longgar merupakan pilihan khusus untuk dapat memenuhi kebutuhan perusahaan guna menghasilkan pendapatan (keuntungan) yang besar dengan biaya yang seminimal mungkin dengan meningkatkan konsumsi faktor produksi.

Kebijakan industri yang longgar ini terkait erat dengan kebijakan merelokasi fasilitas produksi untuk memenuhi tujuan perusahaan multinasional. Merelokasi pabrik untuk *footloose industry* adalah pilihan terbaik karena jenis bisnis ini tidak terikat pada lokasi tertentu, memberikan fleksibilitas lebih untuk merelokasi atau berinvestasi di bidang apa pun yang dianggap paling menguntungkan.

Ciri terpenting dari *footloose industry* adalah fleksibilitasnya, yang dapat digerakkan tanpa dipengaruhi atau terikat oleh faktor produksi tertentu. Contoh *footloose industry* biasanya adalah perusahaan yang memproduksi peralatan berteknologi tinggi. Contoh *footloose industry* adalah perusahaan telepon seluler, perusahaan elektronik, perusahaan mobil, perusahaan laptop dan komputer pribadi.

Biasanya, *footloose industry* bergerak ke berbagai negara di seluruh dunia sebagai perusahaan multinasional. Sebagai industri

lepas yang tidak terikat pada faktor produksi tertentu, berbagai contoh industri ini dapat dengan mudah merelokasi basis produksinya hampir di mana saja.

Secara umum, daerah di negara berkembang dianggap sebagai tujuan investasi yang paling menarik dan menguntungkan. Hal ini karena faktor produksi yang tersedia di negara berkembang yaitu berupa tenaga kerja nilainya lebih kecil. Selain itu, biaya investasi terkait pembelian tanah, pengembangan industri bahkan perpajakan juga relatif lebih rendah.

Dengan tingkat faktor produksi yang rendah tersebut, keuntungan yang dapat diperoleh dengan mengalihkan basis produksi ke negara berkembang juga lebih besar. Kebijakan *footloose industry* juga terkait erat dengan apa yang disebut sebagai keunggulan komparatif. Ini merupakan keunggulan komparatif karena tidak semua negara di dunia dapat menghasilkan produk dengan efisiensi yang sama.

C. Rangkuman

Ciri terpenting dari *footloose industry* adalah fleksibilitasnya, yang dapat digerakkan tanpa dipengaruhi atau terikat oleh faktor produksi tertentu. Contoh *footloose industry* biasanya adalah perusahaan yang memproduksi peralatan berteknologi tinggi. Tujuan utama relokasi industri ini adalah (1) menekan biaya produksi untuk meningkatkan keuntungan dan (2) menciptakan *Global Production Network* (GPN) atau jaringan produksi global

yang kuat. Contoh *footloose industry* adalah perusahaan telepon seluler, perusahaan elektronik, perusahaan mobil, perusahaan laptop dan komputer pribadi.

D. Pendalaman Materi

1. Jelaskan keunggulan *footloose industry*!
2. Carilah sebuah *footloose industry* dan jelaskan bagaimana industri tersebut dapat memaksimalkan keuntungannya melalui sebuah studi kasus!

Daftar Pustaka

- Bakry, Umar Suryadi., Ekonomi Politik Internasional Suatu Pengantar, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019.
- Brown, Christ, Understanding International Relations, Second Edition, New York: PALGRAVE, 2001.
- Deliaarnov. 2006. Ekonomi Politik. Jakarta: Erlangga.
- Frieden, Jeffry A. and Lake, David A., International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth, New York: St. Martin Press, 1991.
- Gilpin, Robert & Gilpin, Millis Jean, Tantangan Kapitalisme Global: Ekonomi Dunia Abad Ke21, Terj. Haris Munandar, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Gilpin, Robert, 1987. "Three Ideologies of Political Economy", dalam The Political Economy of International Relations. Princeton : Princeton University Press.
- Gilpin, Robert, The Political Economy of International Relations, New Jersey: Princeton University Press, 1987.
- Gilpin, Robert. 2001. "The New Global Economic Order", dalam Global Political Economy: Understanding the International Economic Order, Princeton: Princeton University Press
- Gilpin, Robert. 2001. "The Study of International Political Economy", dalam Global Political Economy: Understanding the International Economic Order, Princeton: Princeton University Press
- Jackson, R., & Sorensen, G. 1999. Introduction to International Relations. Oxford: Oxford University Press

- Jackson, Robert & Sorensen, Georg, Pengantar Studi Hubungan Internasional, Terj. Dadan Suryadipura, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Jackson, Robert, & George Sorensen, 1999. "Introduction Political Economy", dalam *Introduction to International Relations*. Oxford : Oxford University Press
- Jeffrey A. Frieden dan David A Lake. 2000. *International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth*. New York: St. Martin's
- John Ravenhill. 2008. *International Political Economy*, dalam Christian Reus Smit and Duncan Snidal, *The Oxford Handbook of International Relations*. New York: Oxford University Press
- Jones, Walter S., *Logika Hubungan Internasional*, Terj. Budiono Kusumohamidjojo, Jakarta: Gramedia, 1993.
- Keohane, Robert O., "The Theory of Hegemonic Stability and Changes in International Economic Regimes" in Ole Holsti, (eds.), *Change in the International System*, New York: West View, 1988.
- Oatley, Thomas. 2011. *International Political Economy*. Pearson
- Richard, Cooper. 2001. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations* dalam John Baylis dan Steve Smith. New York: Oxford University Press
- Ritzer, George & Douglas J. Goodman., *Teori Marxis dan Berbagai Ragam Teori Neo-Marxian*, Kreasi Wacana, Bantul, 2011.
- S.,Nuraeni, & Deasy Silvy, Arfin Sudirman., *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional*, Pustaka Pealajar, Yogyakarta, 2010.
- Wallerstein, Immanuel, "World Sytem Analysis", dalam Anthony Giddens and Jonathan Turner (eds.), *Social Theory Today*, Stanford: Stanford University Pers, 1987.

Wallerstein, Immanuel, *The Modern World System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World Economy in the Sixteenth Century*, New York: Academic Press, 1974.

Wallerstein, Immanuel, *The Politics of the Capitalist World-Economy*, Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

https://www.portal-ilmu.com/2018/02/teori-merkantilisme-sejarah-tokoh-ide_28.html

https://www.portal-ilmu.com/2018/03/teori-liberalisme-dari-sejarah-hingga_7.html

https://www.portal-ilmu.com/2018/03/teori-marxisme-dari-sejarah-tokoh_15.html

https://www.portal-ilmu.com/2018/03/neo-klasik-sejarah-dan-pokok-pemikiran_22.html

https://www.portal-ilmu.com/2018/04/ideologi-neoliberalisme-sejarah-dan_5.html

https://www.portal-ilmu.com/2018/05/developmental-state-teori-pembangunan_31.html

https://www.portal-ilmu.com/2018/06/teori-perdagangan-internasional_7.html

https://www.portal-ilmu.com/2018/05/multinational-corporation-mnc_2.html

https://www.portal-ilmu.com/2018/05/global-justice-dalam-perdagangan_17.html

Profil Penulis

Andika Drajat Murdani, S.IP., M.A.

Penulis adalah dosen yang dipercaya untuk mengajar mata kuliah Ekonomi Politik Internasional pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, di Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta. Ia telah mengabdikan di UNISRI sejak tahun 2018. Konsentrasi studi yang diambil penulis pada saat S1 maupun S2 memang sering menjurus pada isu-isu ekonomi politik internasional. Ini membuatnya mengambil fokus studi S2 pada *Global Trade Diplomacy*.

Hasna Wijayati, S.IP., M.A.

Penulis adalah seorang dosen di Universitas Slamet Riyadi Surakarta sejak tahun 2018. Ia lulus S1 pada tahun 2012 serta kemudian berhasil menyelesaikan S2 nya pada tahun 2014. Dalam studi S1 maupun S2 nya di program studi Ilmu Hubungan Internasional, ia memilih untuk fokus pada tema-tema seputar ekonomi politik internasional, yang melihat pada isu-isu power dan ekonomi. Hal ini membuatnya dipercaya untuk mengajar Mata Kuliah Ekonomi Politik Internasional.

Buku ini merupakan buku ajar untuk mata kuliah Ekonomi Politik Internasional, yang dapat menjadi pengantar pemikiran untuk memahami kompleksitas pemikiran ekonomi politik internasional dalam studi ilmu hubungan internasional dan prodi lain terkait. Pemahaman tentang Ekonomi Politik Internasional adalah hal penting yang perlu dimiliki guna meningkatkan pemahaman tentang dinamika, konsep dan teori yang berlangsung dalam dunia ekonomi dan politik. Ekonomi dan politik merupakan dua aspek yang sesungguhnya memiliki kaitan erat dan saling mempengaruhi. Studi ekonomi murni dan politik murni tidak secara komprehensif melihat keterkaitan antara dua aspek ini, padahal, keduanya adalah hal yang sering tak terpisahkan dalam implementasinya. Hal ini membuat studi tentang ekonomi politik menjadi hal penting. Apalagi, dinamika ekonomi politik ini didalami dengan melihat berbagai peristiwa di tingkat internasional, guna mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai implementasinya di berbagai negara atau berbagai kondisi. Implementasi atau hubungan dari ekonomi dan politik memang dapat berlangsung fleksibel sehingga dibutuhkan banyak studi kasus guna menambah pemahaman.